



NO : 271

**LAPORAN
KEMAJUAN PROYEK PEMBANGUNAN
DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.
TAHUN 1996/1997**

DISPERKUSIP JATIM

TRIWULAN : II

**INSPEKTORAT JENDERAL
DEPARTEMEN KESEHATAN RI.**



DEPARTEMEN KESEHATAN R I INSPEKTORAT JENDERAL

JL : H.R. RASUNA SAID KAV. X5. NO. 4-9
TELP : 5201590 ps. 3102 - 3104 - 4105
JAKARTA SELATAN 12950

Jakarta, 27 Nopember 1996

Nomor : KU.05.03.214.751 A
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Laporan kemajuan Proyek
Pembangunan Depkes R.I.
Triwulan II th. 1996/1997

Yth. Bapak Menteri Kesehatan
Republik Indonesia.

Bersama ini kami sampaikan hasil evaluasi atas kemajuan Proyek Pembangunan Departemen Kesehatan Triwulan II tahun 1996/1997 berdasarkan laporan triwulan Proyek yang diterima Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan sampai dengan tanggal 15 Nopember 1996.

Dari 1073 Proyek/Bagian Proyek (Pr/BP), 925 Pr/BP yang mengirimkan laporan triwulannya (86,2%) dengan daya serap anggaran sebesar 26,43%. Dari 290 Pr/BP yang mendapat Bantuan Luar Negeri (BLN), 173 Pr/BP yang mengirimkan laporan triwulannya (59,5%) dengan daya serap anggaran sebesar 2,92%. Terdapat 118 Pr/BP (15,0%) salah menghitung prosentase fisik dan realisasi keuangan, serta 107 Pr/BP (13,6%) laporannya tidak lengkap.

Kendala-kendala yang paling menonjol secara umum dilaporkan oleh Pemimpin Proyek/Bagian Proyek adalah lemahnya pengurusan keuangan, penyelesaian SPJ dan adanya tanda bintang pada DIP, dilaporkan oleh 55 Pr/BP (22,4%); Terlambatnya petunjuk pelaksanaan kegiatan, dilaporkan oleh 54 Pr/BP (22,0%); Terlambatnya Revisi DIP/PO, SK Pimpro/ Bendaharawan, dilaporkan oleh 23 Pr/BP (9,4%); dan adanya kelemahan personil dalam pelaksanaan kegiatan, dilaporkan oleh 11 Pr/BP (4,5%).

Mengingat bahwa penilaian kemajuan proyek merupakan komponen penilaian program terkait, maka di bawah ini secara khusus disampaikan evaluasi kemajuan tiap-tiap program pembangunan kesehatan. :

1. Program Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

Program ini terdiri dari 59 Proyek/ Bagian proyek (Pr/BP), yang melapor tepat waktu sebanyak 54 Pr/BP (91,5%). Berdasarkan laporan yang diterima, dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Realisasi Fisik

- 25 Pr/BP realisasi fisiknya masih dibawah 25% (sangat lambat)
- 7 Pr/BP realisasi fisiknya baru mencapai 26 s/d 40% (lambat) sisanya telah mencapai 41 s/d 50% atau lebih (pencapaian ini dianggap wajar).

b. Daya Serap Anggaran

- Daya serap Rupiah Murni 26,18% dan
- Daya serap BLN, 18,8%.

Kepada pengendali dan pelaksana program Penyuluhan Kesehatan Masyarakat disarankan agar :

- Mempercepat penyusunan juklak dan juknis yang disyahkan Ditjen Binkesmas serta memperlancar distribusinya kepada proyek-proyek yang bersangkutan
- Mempercepat penyelesaian dokumen tender
- Mempercepat pengesahan kontrak pelaksanaan kegiatan

2. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Program ini terdiri dari 346 Pr/BP, yang melapor tepat waktu sebanyak 272 Pr/BP (78,6%). Berdasarkan laporan yang diterima, dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Realisasi Fisik

- 87 Pr/BP realisasi fisiknya masih dibawah 25% (sangat lambat)
- 56 Pr/BP realisasi fisiknya baru mencapai 26 s/d 40% (lambat) sisanya telah mencapai 41 s/d 50% atau lebih (pencapaian ini dianggap wajar).

b. Daya Serap Anggaran

- Daya serap Rupiah Murni 24,43% dan
- Daya serap BLN, 1,9%.

Disarankan kepada pengendali dan pelaksana program Pelayanan Kesehatan Masyarakat agar :

- Mempercepat penyusunan juklakdan juknis yang disahkan Ditjen Binkesmas serta memperlancar distribusinya kepada proyek-proyek yang bersangkutan
- Mempercepat proses revisi PO
- Memantau dan mempercepat proses revisi DIP
- Memperlancar dan mempercepat penyelesaian SPJ dari Puskesmas

3. Program Pelayanan Kesehatan Rujukan dan RS

Program ini terdiri dari 157 Pr/BP, yang melapor tepat waktu sebanyak 143 Pr/BP (91,1%). Berdasarkan laporan yang diterima, dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Realisasi Fisik

- 73 Pr/BP realisasi fisiknya masih dibawah 25% (sangat lambat)
- 13 Pr/BP realisasi fisiknya baru mencapai 26 s/d 40% (lambat) sisanya telah mencapai 41 s/d 50% atau lebih (pencapaian ini dianggap wajar).

b. Daya Serap Anggaran

- Daya serap Rupiah Murni 9,85% dan
- Daya serap BLN, 0,2%.

Untuk pemecahan masalah di atas, disarankan kepada pengendali dan pelaksana program Pelayanan Rujukan dan RS mengupayakan :

- Memperlancar pengiriman DIP/PO sehingga dapat diterima oleh Proyek/BP tepat waktu
- Mempercepat proses dan distribusi SK Pimpro dan Bendaharawan
- Memperlancar proses pencairan dana yang bertanda bintang
- Lebih mematangkan perencanaan sehingga bisa memperkecil pengaruhkendala geografis pada pelaksanaan kegiatan

4. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Program ini terdiri dari 34 Pr/BP, yang melapor tepat waktu sebanyak 30 Pr/BP (88,2%). Berdasarkan laporan yang diterima, dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Realisasi Fisik

- 7 Pr/BP realisasi fisiknya masih dibawah 25% (sangat lambat)
- 4 Pr/BP realisasi fisiknya baru mencapai 26 s/d 40% (lambat) sisanya telah mencapai 41 s/d 50% atau lebih (pencapaian ini dianggap wajar).

b. Daya Serap Anggaran

- Daya serap Rupiah Murni 46,84% dan
- Daya serap BLN, 0,5%.

Disarankan kepada pengendali dan pelaksana program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, agar :

- a. Mempercepat distribusi SK Pimpro dan Bendaharawan
- b. Mempercepat pengiriman spesifikasi teknis tender dari Pusat
- c. Memperlancar dan mempercepat pengiriman SPJ dari Dati II ke Dati I

5. Program Perbaikan Gizi

Program ini terdiri dari 29 Pr/BP, yang melapor tepat waktu sebanyak 27 Pr/BP (93,1%). Berdasarkan laporan yang diterima, dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Realisasi Fisik

- 14 Pr/BP realisasi fisiknya masih dibawah 25% (sangat lambat)
- 4 Pr/BP realisasi fisiknya baru mencapai 26 s/d 40% (lambat) sisanya telah mencapai 41 s/d 50% atau lebih (pencapaian ini dianggap wajar).

b. Daya Serap Anggaran

- Daya serap Rupiah Murni 11,47% dan
- Daya serap BLN, 1,2%.

Kepada pengendali dan pelaksana program Perbaikan Gizi disarankan agar berupaya :

- a. Mempercepat penyusunan juklak dan juknis yang disyahkan Dirjen Binkesmas serta memperlancar distribusinya kepada proyek yang bersangkutan
- b. Memperlancar pelaksanaan pelatihan PUGS
- c. Meningkatkan pemantauan dan pengendalian kegiatan

6. Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program ini terdiri dari 63 Pr/BP, yang melapor tepat waktu sebanyak 61 Pr/BP (96,8%). Berdasarkan laporan yang diterima, dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Realisasi Fisik

- 21 Pr/BP realisasi fisiknya masih dibawah 25% (sangat lambat)
- 10 Pr/BP realisasi fisiknya baru mencapai 26 s/d 40% (lambat) sisanya telah mencapai 41 s/d 50% atau lebih (pencapaian ini dianggap wajar).

b. Daya Serap Anggaran

- Daya serap Rupiah Murni 26,16% dan
- Daya serap BLN, 1,9%.

Disarankan kepada pengendali dan pelaksana program Pengawasan Obat dan Makanan agar :

- a. Memperlancar dan mempercepat pengiriman barang/bahan yang diadakan di Pusat.
- b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sehingga tepat waktu sesuai dengan rencana.
- c. Memperlancar pengiriman PO sehingga tepat waktu diterima oleh proyek-proyek yang bersangkutan.

7. Program Pembinaan Pengobatan Tradisional

Program ini terdiri dari 6 Pr/BP, yang melapor tepat waktu sebanyak 6 Pr/BP (100%). Berdasarkan laporan yang diterima, dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Realisasi Fisik

- 3 Pr/BP realisasi fisiknya masih dibawah 25% (sangat lambat)
- 3 Pr/BP realisasi fisiknya baru mencapai 26 s/d 40% (lambat) sisanya telah mencapai 41 s/d 50% atau lebih (pencapaian ini dianggap wajar).

b. Daya Serap Anggaran

- Daya serap Rupiah Murni 16,73%

Kepada pengendali dan pelaksana program Pembinaan Pengobatan Tradisional , disarankan agar :

- mempercepat penyusunan Juklak/Juknis yang disahkan Dirjen Binkesmas serta memperlancar pendistribusiannya kepada proyek-proyek yang bersangkutan.

8. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih

Program ini terdiri dari 28 Pr/BP, yang melapor tepat waktu sebanyak 27 Pr/BP (96,4%). Berdasarkan laporan yang diterima, dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Realisasi Fisik

- 8 Pr/BP realisasi fisiknya masih dibawah 25% (sangat lambat)
- 7 Pr/BP realisasi fisiknya baru mencapai 26 s/d 40% (lambat) sisanya telah mencapai 41 s/d 50% atau lebih (pencapaian ini dianggap wajar).

b. Daya Serap Anggaran

- Daya serap Rupiah Murni 19,66%
- Daya serap BLN 0%.

Untuk pemecahan masalah di atas, kepada pengendali dan pelaksana program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih, agar :

- Memperlancar dan mempercepat penerbitan SKO
- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sehingga tepat waktu sesuai dengan rencana.
- Memperlancar dan mempercepat pengiriman SPJ dan Kabupaten.

9. Program Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman

Program ini terdiri dari 37 Pr/BP, yang melapor tepat waktu sebanyak 30 Pr/BP (88,2%). Berdasarkan laporan yang diterima, dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Realisasi Fisik

- 10 Pr/BP realisasi fisiknya masih dibawah 25% (sangat lambat)
- 5 Pr/BP realisasi fisiknya baru mencapai 26 s/d 40% (lambat) sisanya telah mencapai 41 s/d 50% atau lebih (pencapaian ini dianggap wajar).

b. Daya Serap Anggaran

- Daya serap Rupiah Murni 20,87%

Disarankan kepada pengendali dan pelaksana program Peningkatan Kesehatan Lingkungan agar mengatasi kendala yang ada dengan upaya :

- Memperlancar dan mempercepat penyelesaian SPJ dari Puskesmas.
- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan rencana.
- Memperlancar dan mempercepat penyelesaian SPJ dari Kabupaten.

10. Program Pendidikan Kedinasan

Program ini terdiri dari 165 Pr/BP, yang melapor tepat waktu sebanyak 146 Pr/BP (88,5%). Berdasarkan laporan yang diterima, dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Realisasi Fisik

- 33 Pr/BP realisasi fisiknya masih dibawah 25% (sangat lambat)
- 19 Pr/BP realisasi fisiknya baru mencapai 26 s/d 40% (lambat) sisanya telah mencapai 41 s/d 50% atau lebih (pencapaian ini dianggap wajar).

b. Daya Serap Anggaran

- Daya serap Rupiah Murni 33,95%
- Daya serap BLN 7,5%

Untuk pemecahan masalah di atas, kepada pengendali dan pelaksana program Pendidikan Kedinasan, agar :

- a. Mempercepat dan memantau usulan revisi DIP yang disampaikan ke Menteri Keuangan dan Bappenas.
- b. Mempercepat penyelesaian dokumen tender.
- c. Meningkatkan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pendidikan sehingga target tercapai sesuai dengan rencana.

11. Program Pendidikan dan Pelatihan aparatur Negara

Program ini terdiri dari 31 Pr/BP, yang melapor tepat waktu sebanyak 28 Pr/BP (90,3%). Berdasarkan laporan yang diterima, dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Realisasi Fisik

- 11 Pr/BP realisasi fisiknya masih dibawah 25% (sangat lambat)
- 2 Pr/BP realisasi fisiknya baru mencapai 26 s/d 40% (lambat) sisanya telah mencapai 41 s/d 50% atau lebih (pencapaian ini dianggap wajar).

b. Daya Serap Anggaran

- Daya serap Rupiah Murni 26,57%
- Daya serap BLN 4,2%

Kepada pengendali dan pelaksana program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara, disarankan agar :

- a. Mempercepat penyusunan juklak dan juknis yang disahkan Kepala Pusdiklat serta memperlancar distribusinya kepada proyek-proyek yang bersangkutan
- b. Mematangkan perencanaan dan mempercepat usulan pencairan dana yang bertanda bintang.

12. Program Penelitian dan Pengembangan

Program ini terdiri dari 8 Pr/BP, yang melapor tepat waktu sebanyak 8 Pr/BP (100%). Berdasarkan laporan yang diterima, dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Realisasi Fisik

- 2 Pr/BP realisasi fisiknya masih dibawah 25% (sangat lambat)
- Sisanya telah mencapai 41 s/d 50% atau lebih (pencapaian ini dianggap wajar).

b. Daya Serap Anggaran

- Daya serap Rupiah Murni 16,69%

Disarankan kepada pengendali dan pelaksana program Penelitian dan Pengembangan agar :

- Memperlancar pengiriman DIP sehingga dapat diterima tepat waktu oleh proyek-proyek terkait.
- Memperlancar dan mempercepat proses tender ulang.
- Mempercepat proses tender pengadaan peralatan.

13. Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda

Program ini hanya terdapat 1 Pr/BP dan telah melapor tepat waktu (100%). Berdasarkan laporan yang diterima, dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Realisasi Fisik

- Realisasi fisiknya baru mencapai 26 s/d 40% (lambat)

b. Daya Serap Anggaran

- Daya serap Rupiah Murni 34,6%

Berdasarkan laporan yang masuk tidak tercatat kendala yang menyebabkan rendahnya realisasi fisik dan daya serap anggaran.

14. Program Peningkatan Peranan Wanita

Program ini terdiri dari 28 Pr/BP, yang melapor tepat waktu sebanyak 21 Pr/BP (75%). Berdasarkan laporan yang diterima, dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Realisasi Fisik

- 13 Pr/BP realisasi fisiknya masih dibawah 25% (sangat lambat)
- 2 Pr/BP realisasi fisiknya baru mencapai 26 s/d 40% (lambat) sisanya telah mencapai 41 s/d 50% atau lebih (pencapaian ini dianggap wajar).

b. Daya Serap Anggaran

- Daya serap Rupiah Murni 16,72%

Untuk pemecahan masalah yang ada, disarankan kepada pengendali dan pelaksana program Peningkatan Peranan Wanita, agar :

- Memperlancar pengiriman DIP dan PO sehingga tepat waktu diterima oleh proyek-proyek terkait.
- Mempercepat penyusunan Juklak/Juknis yang disahkan Dirjen Binkesmas serta memperlancar distribusinya kepada proyek yang bersangkutan.

15. Program Pengembangan Informasi Kesehatan

Program ini terdiri dari 34 Pr/BP, yang melapor tepat waktu sebanyak 28 Pr/BP (82,4%). Berdasarkan laporan yang diterima, dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Realisasi Fisik

- 10 Pr/BP realisasi fisiknya masih dibawah 25% (sangat lambat)
- 3 Pr/BP realisasi fisiknya baru mencapai 26 s/d 40% (lambat) sisanya telah mencapai 41 s/d 50% atau lebih (pencapaian ini dianggap wajar).

b. Daya Serap Anggaran

- Daya serap Rupiah Murni 26,45%
- Daya serap BLN 10,4%

Disarankan kepada pengendali dan pelaksana program Pengembangan Informasi Kesehatan agar :

- Mengendalikan kegiatan sehingga pelaksanaannya tepat waktu sesuai dengan rencana
- Memperlancar dan mempercepat pencetakan buku profil kesehatan.

16. Program Pengembangan Hukum Kesehatan

Program ini hanya terdapat 1 Pr/BP dan telah melapor tepat waktu (100%). Berdasarkan laporan yang diterima, dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Realisasi Fisik

- Realisasi fisiknya baru mencapai 26 s/d 40% (lambat)

b. Daya Serap Anggaran

- Daya serap Rupiah Murni 36,17%

Berdasarkan laporan yang masuk tidak tercatat kendala yang menyebabkan rendahnya realisasi fisik dan daya serap anggaran.

17. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

Program ini terdiri dari 18 Pr/BP, yang melapor tepat waktu sebanyak 13 Pr/BP (72,2%). Berdasarkan laporan yang diterima, dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Realisasi Fisik

- 10 Pr/BP realisasi fisiknya masih dibawah 25% (sangat lambat)
- 1 Pr/BP realisasi fisiknya baru mencapai 26 s/d 40% (lambat) sisanya telah mencapai 41 s/d 50% atau lebih (pencapaian ini dianggap wajar).

b. Daya Serap Anggaran

- Daya serap Rupiah Murni 8,33%
- Daya serap BLN 2,6%

Berdasarkan laporan yang masuk tidak tercatat kendala yang menyebabkan rendahnya realisasi fisik dan daya serap anggaran.

18. Program Peningkatan Efisiensi Aparatur Negara

Program ini terdiri dari 33 Pr/BP, yang melapor tepat waktu sebanyak 29 Pr/BP (87,9%). Berdasarkan laporan yang diterima, dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Realisasi Fisik

- 7 Pr/BP realisasi fisiknya masih dibawah 25% (sangat lambat)
- 3 Pr/BP realisasi fisiknya baru mencapai 26 s/d 40% (lambat) sisanya telah mencapai 41 s/d 50% atau lebih (pencapaian ini dianggap wajar).

b. Daya Serap Anggaran

- Daya serap Rupiah Murni 36,39%
- Daya serap BLN 3,5%

Kepada pengendali dan pelaksana program Peningkatan Efisiensi Aparatur Negara agar berupaya mengatasi kendala yang ada , yaitu :

- a. Mempercepat proses dan distribusi SK Pimpro dan Bendaharawan
- b. Mempercepat penyusunan Juklak/Juknis yang disahkan oleh Sekretaris Jenderal serta memperlancar distribusinya kepada proyek-proyek yang bersangkutan.

19. Program Pendayagunaan Sistem Pelaksanaan Pengawasan (tidak ada proyek).

Demikian uraian analisa kemajuan proyek Depkes Triwulan II tahun 1996/1997, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih, dan mohon petunjuk serta pengarahan lebih lanjut.

INSPEKTUR JENDERAL

Dr. Rusmono, SKM.

Tembusan Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menko Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan.
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
4. IRJENBANG
5. ASWAS Wakil Presiden RI
6. Deputy DALLAK BAPPENAS
7. Sekretaris Jenderal Depkes RI
8. Para Dirjen DEPKES RI.
9. Kepala Badan LITBANGKES
10. Para Kepala Pusat-Pusat Depkes RI.
11. Para Kakanwil Depkes
12. Biro Kesehatan dan Gizi BAPPENAS.
13. Arsip

NO : 271

**LAPORAN
KEMAJUAN PROYEK PEMBANGUNAN
DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.
TAHUN 1996/1997**

TRIWULAN : II

**INSPEKTORAT JENDERAL
DEPARTEMEN KESEHATAN RI.**

DISPERFUSIP JATIM

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR LAMPIRAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
LAPORAN KEMAJUAN PROYEK PEMBANGUNAN DEPARTEMEN KESEHATAN TAHUN 1996/1997 TRIWULAN II	1
I PENDAHULUAN	1
II REALISASI KEMAJUAN PROYEK PEMBANGUNAN	2
A. Analisa Pelaksanaan Program	2
B. Perimbangan Realisasi Fisik dengan Realisasi Keuangan	12
C. Realisasi Anggaran Rupiah Murni	13
1. Menurut Program	13
2. Menurut Lokasi	14
3. Menurut Unit Organisasi	16
D. Anggaran Bantuan Luar Negeri	17
1. Realisasi Anggaran Bantuan Luar Negeri Menurut Program	17
2. Realisasi Anggaran Bantuan Luar Negeri Menurut Provinsi	18
3. Realisasi Anggaran Bantuan Luar Negeri Menurut Unit Organisasi	19
E. Evaluasi Kebenaran Laporan Triwulan Proyek	19
III PENUTUP	20
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Rangkuman Laporan Triwulan Proyek Pembangunan Depkes RI Th. 1996/1997 Triwulan II menurut Program
- LAMPIRAN 2 : Rangkuman Laporan Triwulan Proyek Pembangunan Depkes RI Th. 1996/1997 Triwulan II menurut Provinsi
- LAMPIRAN 3 : Rangkuman Laporan Triwulan Proyek Pembangunan Depkes RI Th. 1996/1997 Triwulan II menurut Unit Organisasi
- LAMPIRAN 4 : Daftar Proyek/Bagian Proyek yang laporannya sampai dengan Triwulan II Th. 1996/1997 belum diterima Inspektorat Jenderal Depkes
- LAMPIRAN 5 : Daftar Proyek/Bagian Proyek yang laporan Triwulan II belum diterima Inspektorat Jenderal Depkes data diambil dari Triwulan sebelumnya
- LAMPIRAN 6 : Daftar Proyek/Bagian Proyek yang mengirim laporan Triwulan II dengan menggunakan form lama
- LAMPIRAN 7 : Daftar Proyek/Bagian Proyek yang mengirim laporan Triwulan II tetapi tidak melampirkan form B1-a
- LAMPIRAN 8 : Daftar Proyek/Bagian Proyek yang mengirim laporan Triwulan II tetapi tidak melampirkan form A
- LAMPIRAN 9 : Daftar Proyek/Bagian Proyek yang mengirim laporan Triwulan II disatukan BLN
- LAMPIRAN 10 : Inventarisasi kesalahan pengisian laporan pelaksanaan kemajuan proyek pada Triwulan II TA. 1996/1997
- LAMPIRAN 11 : Ketaatan laporan dan jenis kesalahan pelaksanaan kemajuan proyek pembangunan Depkes Triwulan II TA. 1996/1997
- LAMPIRAN 12 : Daftar obyek/sub obyek Bantuan Luar Negeri Depkes TA. 1996/1997 yang diolah dalam Triwulan II
- LAMPIRAN 13 : Alokasi dan realisasi anggaran BLN Depkes TA. 1996/1997 Triwulan II menurut Program
- LAMPIRAN 14 : Alokasi dan realisasi anggaran BLN Depkes TA. 1996/1997 Triwulan II menurut Provinsi

- LAMPIRAN 15 : Alokasi dan realisasi anggaran BLN Depkes TA. 1996/1997 Triwulan II menurut Lokasi
- LAMPIRAN 16 : Alokasi dan realisasi anggaran BLN Depkes TA. 1996/1997 Triwulan II menurut Unit Organisasi
- LAMPIRAN 17 : Jenis hambatan pelaksanaan proyek pembangunan Th. 1996/1997 Triwulan II

DISPERPUSIP JATIM

KATA PENGANTAR

Laporan kemajuan proyek pembangunan diperlukan untuk menilai pelaksanaan kegiatan, baik oleh para pelaksana maupun pengendali Program Pembangunan dilingkungan Departemen Kesehatan.

Buku laporan Kemajuan Proyek Triwulan II tahun 1996/1997 memuat antara lain :

- Evaluasi terhadap ketaatan pengiriman laporan secara tepat waktu
- Pencapaian realisasi fisik dan keuangan
- Kebenaran cara pengisian laporan
- Kelengkapan isi laporan dan
- Hambatan yang dijumpai oleh para pelaksana Proyek Pembangunan.

Laporan ini merupakan umpan balik bagi para pemimpin Proyek Pembangunan yang telah mengirimkan satu rangkap laporan Kemajuan Proyek Pembangunan kepada Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan. Diharapkan informasi ini dapat bermanfaat sebagai bahan pengawasan melekat bagi para pengendali Program ditingkat Pusat maupun ditingkat Propinsi.

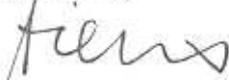
Guna meningkatkan hasilguna laporan ini, masukan berupa saran positif sangat diharapkan.

Demikianlah atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih, semoga buku ini dapat bermanfaat.

Jakarta, Nopember 1996

INSPEKTORAT JENDERAL
DEPARTEMEN KESEHATAN

Sekretaris,



Drg. Kuswartini MS.
NIP/140058613



DEPARTEMEN KESEHATAN TAHUN 1996/1997
TRIWULAN II
(Keadaan Per 15 Nopember 1996)

I. PENDAHULUAN.

Pengawasan fungsional pada dasarnya dilakukan dengan dua cara yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung meliputi kegiatan pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan pengecekan, sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan melalui evaluasi terhadap materi laporan yang diterima atau dikumpulkan Inspektorat Jenderal baik secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai aparat pengawasan fungsional.

Sesuai KEPPRES No.16 tahun 1994 dan Instruksi Menteri Kesehatan Nomor 174 tahun 1977 serta SE SETJEN DEPKES No. 1278/SJ/SE/B.Perenc/1990, sebagai sumber data evaluasi proyek pembangunan Depkes adalah laporan berkala yang dikirim oleh setiap proyek di lingkungan Departemen Kesehatan berupa laporan triwulan kemajuan proyek.

Laporan kemajuan Proyek Triwulan II Tahun 1996/1997 yakni form B1.a dan Form A yang diterima ITJEN sebagai bahan evaluasi ini adalah 925 laporan dari sejumlah 1073 Proyek/Bagian Proyek atau sekitar 86,2%.

Tujuan laporan ini adalah untuk menyajikan informasi tentang penilaian pelaksanaan program Departemen Kesehatan berdasarkan laporan kemajuan proyek Depkes pada Triwulan II 1996/1997 sebagai hasil pengawasan tidak langsung yang dilakukan Inspektorat Jenderal dengan harapan informasi ini dapat dijadikan pegangan bagi pengambil keputusan ditingkat Pusat maupun ditingkat Propinsi.

Pokok-pokok yang dianalisa dan disajikan dalam laporan evaluasi ini meliputi realisasi fisik dan realisasi anggaran pembangunan menurut kelompok kelompok program, unit utama dan lokasi serta inventarisasi masalah dan hambatan pelaksanaan pembangunan.

Pelaksanaan tindak lanjut oleh para pelaksana dan pengendali program atas saran tindak yang dikemukakan dalam evaluasi ini sebagai hasil pengawasan tidak langsung, perlu dipantau seperti yang dilakukan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan.

II. REALISASI KEMAJUAN PROYEK PEMBANGUNAN

A. Analisa Pelaksanaan Program

Analisa pelaksanaan program berdasarkan laporan Triwulan II Proyek-proyek Depkes adalah sebagai berikut :

1. **Program Penyuluhan Kesehatan Masyarakat** dari 59 Proyek/Bagian proyek (Pr/BP) yang melapor tepat waktu sebanyak 54 Pr/BP (91,5%). Berdasarkan laporan yang masuk terdapat 25 Pr/BP yang realisasi fisiknya masih dibawah 25% (sangat lambat) dan ada 7 Pr/BP yang baru mencapai 26 s/d 40% (lambat) sisanya telah mencapai 41 s/d 50% atau lebih (pencapaian ini dianggap wajar) sementara itu daya serap anggaran Rupiah Murni 26,18% dan anggaran BLN baru mencapai 18,8%.

Kendala yang menyebabkan rendahnya realisasi fisik dan keuangan berdasarkan laporan tersebut tercatat sebagai berikut :

- a. Petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dari Pusat belum diterima
- b. Penyusunan dokumen tender belum selesai
- c. Kontrak pelaksanaan kegiatan belum ditanda tangani

Untuk pemecahan masalah rendahnya realisasi fisik dan keuangan tersebut maka disarankan kepada pengendali dan pelaksana program agar di Triwulan berikutnya berusaha meniadakan (mengeliminir) kendala-kendala tersebut terhadap proyek-proyek bermasalah dilingkungan Program Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, dengan melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Mempercepat penyusunan juklak dan juknis yang disahkan Ditjen Binkesmas serta memperlancar distribusinya kepada proyek-proyek yang bersangkutan
 - b. Mempercepat penyelesaian dokumen tender
 - c. Mempercepat pengesahan kontrak pelaksanaan kegiatan
2. **Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat** dari 346 Pr/BP, yang melapor tepat waktu sebanyak 272 Pr/BP (78,6%).Berdasarkan laporan yang masuk terdapat 87 Pr/BP yang realisasi fisiknya masih dibawah 25% (sangat lambat) dan ada 56 Pr/BP yang baru mencapai 26 s/d 40% (lambat) sisanya telah mencapai 41 s/d 50% atau lebih (pencapaian ini dianggap wajar) sementara itu daya serap anggaran Rupiah Murni 24,43% dan anggaran BLN baru mencapai 1,9%.

Kendala yang menyebabkan rendahnya realisasi fisik dan keuangan berdasarkan laporan tersebut tercatat sebagai berikut :

- a. Petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dari Pusat belum diterima (5 peristiwa)
- b. Perubahan PO belum diterima (3 peristiwa)
- c. Usul revisi yang diajukan kepada Menkes belum diterima persetujuannya (3 peristiwa)
- d. Penyelesaian SPJ dari Puskesmas terlambat diterima (3 peristiwa)

Untuk pemecahan masalah rendahnya realisasi fisik dan keuangan tersebut maka disarankan kepada pengendali dan pelaksana program agar di Triwulan berikutnya berusaha meniadakan (mengeliminir) kendala-kendala tersebut terhadap proyek-proyek bermasalah dilingkungan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat, dengan melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Mempercepat penyusunan juklakdan juknis yang disahkan Ditjen Binkesmas serta memperlancar distribusinya kepada proyek-proyek yang bersangkutan
 - b. Mempercepat proses revisi PO
 - c. Memantau dan mempercepat proses revisi DIP
 - d. Memperlancar dan mempercepat penyelesaian SPJ dari Puskesmas
3. Program Pelayanan Kesehatan Rujukan dan RS dari 157 Pr/BP yang melapor tepat waktu sebanyak 143 Pr/BP (91,1%). Berdasarkan laporan yang masuk terdapat 73 Pr/BP yang realisasi fisiknya masih dibawah 25% (sangat lambat) dan ada 13 Pr/BP yang baru mencapai 26 s/d 40% (lambat) sisanya telah mencapai 41 s/d 50% atau lebih (pencapaian ini dianggap wajar) sementara itu daya serap anggaran Rupiah Murni 9,85% dari anggaran BLN baru mencapai 0,2%.

Kendala yang menyebabkan rendahnya realisasi fisik dan keuangan berdasarkan laporan tersebut tercatat sebagai berikut :

- a. DIP/PO terlambat diterima (2 peristiwa)
- b. SK Pemimpin Proyek terlambat diterima (2 peristiwa)
- c. Adanya tanda bintang pada bebrapa kegiatan (2 peristiwa)
- d. Keadaan geografi tidak mendukung pelaksanaan kegiatan

Untuk pemecahan masalah rendahnya realisasi fisik dan keuangan tersebut maka disarankan kepada pengendali dan pelaksana program agar di Triwulan berikutnya berusaha meniadakan (mengeliminir) kendala-kendala tersebut terhadap proyek-proyek bermasalah dilingkungan Program Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Rumah Sakit, dengan melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Memperlancar pengiriman DIP/PO sehingga dapat diterima oleh Proyek/BP tepat waktu
 - b. Mempercepat proses dan distribusi SK Pimpro dan Bendaharawan
 - c. Memperlancar proses pencairan dana yang bertanda bintang
 - d. Lebih mematangkan perencanaan sehingga bisa memperkecil pengaruh kendala geografis pada pelaksanaan kegiatan
4. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dari 34 Pr/BP yang melapor tepat waktu sebanyak 30 Pr/BP (88,2%). Berdasarkan laporan yang masuk terdapat 7 Pr/BP yang realisasi fisiknya masih dibawah 25% (sangat lambat) dan ada 4 Pr/BP yang baru mencapai 26 s/d 40% (lambat) sisanya telah mencapai 41 s/d 50% atau lebih (pencapaian ini dianggap wajar) sementara itu daya serap anggaran Rupiah Murni 46,84% dan anggaran BLN baru mencapai 0,5% .

Kendala yang menyebabkan rendahnya realisasi fisik dan keuangan berdasarkan laporan tersebut tercatat sebagai berikut :

- a. SK Pemimpin /Bendaharwan Proyek terlambat diterima (2 peristiwa)
- b. Spesifikasi teknis terlambat diterima dari Pusat (2 peristiwa)
- c. SPJ pelaksanaan kegiatan dari Dati II belum diterima di Dati I.

Untuk pemecahan masalah rendahnya realisasi fisik dan keuangan tersebut maka disarankan kepada pengendali dan pelaksana program agar di Triwulan berikutnya berusaha meniadakan (mengeliminir) kendala-kendala tersebut terhadap proyek-proyek bermasalah dilingkungan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, dengan melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Mempercepat distribusi SK Pimpro dan Bendaharawan
 - b. Mempercepat pengiriman spesifikasi teknis tender dari Pusat
 - c. Memperlancar dan mempercepat pengiriman SPJ dari Dati II ke Dati I
5. Program Perbaikan Gizi dari 29 Pr/BP yang melapor tepat waktu sebanyak 27 Pr/BP (93,1%). Berdasarkan laporan yang masuk terdapat 14 Pr/BP yang realisasi fisiknya masih dibawah 25% (sangat lambat) dan ada 4 Pr/BP yang baru mencapai 26 s/d 40% (lambat) sisanya telah mencapai 41 s/d 50% atau lebih (pencapaian ini dianggap wajar) sementara itu daya serap anggaran baru Rupiah Murni 11,47% dan anggaran BLN baru mencapai 1,2%.

Kendala yang menyebabkan rendahnya realisasi fisik dan keuangan berdasarkan laporan tersebut tercatat sebagai berikut :

- a. Petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dari Pusat terlambat diterima (2 peristiwa)
- b. Pelatihan PUGS (Pola Umum Gizi Seimbang) mundur dari jadwal yang sudah ditentukan
- c. Pemantauan dan pengendalian kegiatan belum dilaksanakan secara maksimal

Untuk pemecahan masalah rendahnya realisasi fisik dan keuangan tersebut maka disarankan kepada pengendali dan pelaksana program agar di Triwulan berikutnya berusaha meniadakan (mengeliminir) kendala-kendala tersebut terhadap proyek-proyek bermasalah dilingkungan Program Perbaikan Gizi, dengan melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Mempercepat penyusunan juklak dan juknis yang disyahkan Dirjen Binkesmas serta memperlancar distribusinya kepada proyek yang bersangkutan
 - b. Memperlancar pelaksanaan pelatihan PUGS
 - c. Meningkatkan pemantauan dan pengendalian kegiatan
6. Program Pengawasan Obat dan Makanan dari 63 Pr/BP yang melapor tepat waktu sebanyak 61 Pr/BP (96,8%). Berdasarkan laporan yang masuk terdapat 21 Pr/BP yang realisasi fisiknya masih dibawah 25% (sangat lambat) dan ada 10 Pr/BP yang baru mencapai 26 s/d 40% (lambat) sisanya telah mencapai 41 s/d 50% atau lebih (pencapaian ini dianggap wajar) sementara itu daya serap anggaran Rupiah Murni 26,16% dan anggaran BLN baru mencapai 1,9%.

Kendala yang menyebabkan rendahnya realisasi fisik dan keuangan berdasarkan laporan tersebut tercatat sebagai berikut :

- a. Barang bahan yang diadakan oleh Pusat terlambat diterima.
- b. Pelaksanaan kegiatan diundurkan.
- c. PO terlambat diterima.

Untuk pemecahan masalah rendahnya realisasi fisik dan keuangan tersebut maka disarankan kepada pengendali dan pelaksana program agar di Triwulan berikutnya berusaha meniadakan (mengeliminir) kendala-kendala tersebut terhadap proyek-proyek bermasalah dilingkungan Program Pengawasan Obat dan Makanan, dengan melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Memperlancar dan mempercepat pengiriman barang/bahan yang diadakan di Pusat.
- b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sehingga tepat waktu sesuai dengan rencana.
- c. Memperlancar pengiriman PO sehingga tepat waktu diterima oleh proyek-proyek yang bersangkutan.

7. Program Pembinaan Pengobatan Tradisional dari 6 Pr/BP yang melapor tepat waktu sebanyak 6 Pr/BP (100%). Berdasarkan laporan yang masuk terdapat 3 Pr/BP yang realisasi fisiknya masih dibawah 25% (sangat lambat) dan ada 3 Pr/BP yang baru mencapai 26 s/d 40% (lambat) sisanya telah mencapai 41 s/d 50% atau lebih (pencapaian ini dianggap wajar) sementara itu daya serap anggaran Rupiah murni adalah 16,73%.

Kendala yang menyebabkan rendahnya realisasi fisik dan keuangan berdasarkan laporan tersebut adalah petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dari Pusat belum diterima.

Untuk pemecahan masalah rendahnya realisasi fisik dan keuangan tersebut maka disarankan kepada pengendali dan pelaksana program agar di Triwulan berikutnya berusaha meniadakan (mengeliminir) kendala-kendala tersebut terhadap proyek-proyek bermasalah dilingkungan Program Pembinaan Pengobatan Tradisional, dengan melaksanakan upaya-upaya seperti mempercepat penyusunan Juklak/Juknis yang disahkan Dirjen Binkesmas serta memperlancar pendistribusiannya kepada proyek-proyek yang bersangkutan.

8. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih dari 28 Pr/BP yang melapor tepat waktu sebanyak 27 Pr/BP (96,4%). Berdasarkan laporan yang masuk terdapat 8 Pr/BP yang realisasi fisiknya masih dibawah 25% (sangat lambat) dan ada 7 Pr/BP yang baru mencapai 26 s/d 40% (Lambat) sisanya telah mencapai 41 s/d 50% atau lebih (pencapaian ini dianggap wajar) sementara itu daya serap anggaran Rupiah Murni adalah 19,66% dan anggaran BLN masih belum ada realisasinya (0%).

Kendala yang menyebabkan rendahnya realisasi fisik dan keuangan berdasarkan laporan tersebut tercatat sebagai berikut :

- a. Penerbitan SKO terlambat.
- b. Pelaksanaan kegiatan diundurkan.
- c. SPJ dari kabupaten terlambat diterima.

Untuk pemecahan masalah rendahnya realisasi fisik dan keuangan tersebut maka disarankan kepada pengendali dan pelaksana program agar di Triwulan berikutnya berusaha meniadakan (mengeliminir) kendala-kendala tersebut terhadap proyek-proyek bermasalah dilingkungan Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih, dengan melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Memperlancar dan mempercepat penerbitan SKO
- b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sehingga tepat waktu sesuai dengan rencana.
- c. Memperlancar dan mempercepat pengiriman SPJ dan Kabupaten.

9. Program Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman dari 32 Pr/BP yang melapor tepat waktu sebanyak 30 Pr/BP (88,2%). Berdasarkan laporan yang masuk terdapat 10 Pr/BP yang realisasi fisiknya masih dibawah 25% (sangat lambat) dan ada 5 Pr/BP yang baru mencapai 26 s/d 40% (lambat) sisanya telah mencapai 41 s/d 50% atau lebih (pencapaian ini dianggap wajar) sementara itu daya serap anggaran Rupiah Murni adalah 20,87% dan anggaran BLN masih belum ada realisasinya (0%).

Kendala yang menyebabkan rendahnya realisasi fisik dan keuangan berdasarkan laporan tersebut tercatat sebagai berikut :

- a. SPJ dari Puskesmas terlambat diterima.
- b. Pelatihan petugas sanitasi belum dilaksanakan .
- c. Terlambat mengirimkan laporan keuangan dari kabupaten.

Untuk pemecahan masalah rendahnya realisasi fisik dan keuangan tersebut maka disarankan kepada pengendali dan pelaksana program agar di Triwulan berikutnya berusaha meniadakan (mengeliminir) kendala-kendala tersebut terhadap proyek-proyek bermasalah dilingkungan Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan dan Pemukiman, dengan melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Memperlancar dan mempercepat penyelesaian SPJ dari Puskesmas.
- b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan rencana.
- c. Memperlancar dan mempercepat penyelesaian SPJ dari Kabupaten.

10. Program Pendidikan Kedinasan dari 165 Pr/BP yang melapor tepat waktu sebanyak 146 Pr/BP (88,5%). Berdasarkan laporan yang masuk terdapat 33 Pr/BP yang realisasi fisiknya masih dibawah 25% (sangat lambat) dan ada 19 Pr/BP yang baru mencapai 26 s/d 40% (lambat) sisanya telah mencapai 41 s/d 50% atau lebih (pencapaian ini dianggap wajar) sementara itu daya serap anggaran Rupiah Murni adalah 33,95% dan anggaran BLN baru mencapai 7,5%.

Kendala yang menyebabkan rendahnya realisasi fisik dan keuangan berdasarkan laporan tersebut tercatat sebagai berikut :

- a. Usul revisi yang diajukan kepada Menteri Keuangan/Bappenas belum disetujui. (4 peristiwa)
- b. Penyusunan dokumen tender belum selesai dari konsultan.
- c. Target kegiatan tidak tercapai karena ada beberapa siswa dikeluarkan dari pendidikan.

Untuk pemecahan masalah rendahnya realisasi fisik dan keuangan tersebut maka disarankan kepada pengendali dan pelaksana program agar di Triwulan berikutnya berusaha meniadakan (mengeliminir) kendala-kendala tersebut terhadap proyek-proyek bermasalah dilingkungan Program Pendidikan Kedinasan, dengan melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Mempercepat dan memantau usulan revisi DIP yang disampaikan ke Menteri Keuangan dan Bappenas.
- b. Mempercepat penyelesaian dokumen tender.
- c. Meningkatkan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pendidikan sehingga target tercapai sesuai dengan rencana.

11. Program Pendidikan dan Pelatihan aparatur Negara dari 31 Pr/BP, yang melapor tepat waktu sebanyak 28 Pr/BP (90,3%). Berdasarkan laporan yang masuk terdapat 11 Pr/BP yang realisasi fisiknya masih dibawah 25% (sangat lambat) dan ada 2 Pr/BP yang baru mencapai 26 s/d 40% (lambat) sisanya telah mencapai 41 s/d 50% atau lebih (pencapaian ini dianggap wajar) sementara itu daya serap anggaran Rupiah Murni adalah 26,57% dan anggaran BLN baru mencapai 4,2%.

Kendala yang menyebabkan rendahnya realisasi fisik dan keuangan berdasarkan laporan tersebut tercatat sebagai berikut :

- a. Petunjuk pelaksanaan /Juknis dari Pusat belum/terlambat diterima. (2 peristiwa)
- b. Ada beberapa kegiatan dibintangi.

Untuk pemecahan masalah rendahnya realisasi fisik dan keuangan tersebut maka disarankan kepada pengendali dan pelaksana program agar di Triwulan berikutnya berusaha meniadakan (mengeliminir) kendala-kendala tersebut terhadap proyek-proyek bermasalah dilingkungan Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara, dengan melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Mempercepat penyusunan juklak dan juknis yang disahkan Kepala Pusdiklat serta memperlancar distribusinya kepada proyek-proyek yang bersangkutan
- b. Mematangkan perencanaan dan mempercepat usulan pencairan dana yang bertanda bintang.

12. Program Penelitian dan Pengembangan dari 8 Pr/BP yang melapor tepat waktu sebanyak 8 Pr/BP (100%). Berdasarkan laporan yang masuk terdapat 2 Pr/BP yang realisasi fisiknya masih dibawah 25% (sangat lambat) sisanya telah mencapai 41 s/d 50% atau lebih (pencapaian ini dianggap wajar) sementara itu daya serap anggaran Rupiah Murni baru mencapai 16,69%.

Kendala yang menyebabkan rendahnya realisasi fisik dan keuangan berdasarkan laporan tersebut tercatat sebagai berikut :

- a. DIP terlambat diterima.
- b. Tender ulang, karena harga penawaran melampaui pagu anggaran
- c. Tender pengadaan peralatan masih dalam proses penyelesaian.

Untuk pemecahan masalah rendahnya realisasi fisik dan keuangan tersebut maka disarankan kepada pengendali dan pelaksana program agar di Triwulan berikutnya berusaha meniadakan (mengeliminir) kendala-kendala tersebut terhadap proyek-proyek bermasalah di lingkungan Program Penelitian dan Pengembangan, dengan melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Memperlancar pengiriman DIP sehingga dapat diterima tepat waktu oleh proyek-proyek terkait.
 - b. Memperlancar dan mempercepat proses tender ulang.
 - c. Mempercepat proses tender pengadaan peralatan.
13. Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda hanya terdapat 1 Proyek dan telah melapor tepat waktu. Berdasarkan laporan tersebut ternyata realisasi fisiknya baru mencapai mencapai 26 s/d 40% (lambat). Sementara itu daya serap anggaran Rupiah Murni baru mencapai 34,6%. Berdasarkan laporan yang masuk tidak tercatat kendala yang menyebabkan rendahnya realisasi fisik dan daya serap anggaran.
14. Program Peningkatan Peranan Wanita dari 28 Pr/BP yang melapor tepat waktu sebanyak 21 Pr/BP (75%). Berdasarkan laporan yang masuk terdapat 13 Pr/BP yang realisasi fisiknya masih dibawah 25% (sangat lambat) dan ada 2 Pr/BP yang baru mencapai 26 s/d 40% (lambat) sisanya telah mencapai 41 s/d 50% atau lebih (pencapaian ini dianggap wajar) sementara itu daya serap anggaran Rupiah Murni adalah 16,72%.

Kendala yang menyebabkan rendahnya realisasi fisik dan keuangan berdasarkan laporan tersebut tercatat sebagai berikut :

- a. DIP dan PO terlambat diterima
- b. Juklak atau Juknis dari Pusat terlambat diterima

Untuk pemecahan masalah rendahnya realisasi fisik dan keuangan tersebut maka disarankan kepada pengendali dan pelaksana program agar di Triwulan berikutnya berusaha meniadakan (mengeliminir) kendala-kendala tersebut terhadap proyek-proyek bermasalah di lingkungan Program Peningkatan Peranan Wanita, dengan melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Memperlancar pengiriman DIP dan PO sehingga tepat waktu diterima oleh proyek-proyek terkait.
 - b. Mempercepat penyusunan Juklak/Juknis yang disahkan Dirjen Binkesmas serta memperlancar distribusinya kepada proyek yang bersangkutan.
15. **Program Pengembangan Informasi Kesehatan** dari 34 Pr/BP yang melapor tepat waktu sebanyak 28 Pr/BP (82,4%). Berdasarkan laporan yang masuk terdapat 10 Pr/BP yang realisasi fisiknya masih dibawah 25% (sangat lambat) dan ada 3 Pr/BP yang baru mencapai 26 s/d 40% (lambat) sisanya telah mencapai 41 s/d 50% atau lebih (pencapaian ini dianggap wajar) sementara itu daya serap anggaran Rupiah Murni adalah 26,45% dan anggaran BLN baru mencapai 10,4%.

Kendala yang menyebabkan rendahnya realisasi fisik dan keuangan berdasarkan laporan tersebut tercatat sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan diundurkan.
- b. Pencetakan buku profil kesehatan terlambat dilaksanakan.

Untuk pemecahan masalah rendahnya realisasi fisik dan keuangan tersebut maka disarankan kepada pengendali dan pelaksana program agar di Triwulan berikutnya berusaha meniadakan (mengeliminir) kendala-kendala tersebut terhadap proyek-proyek bermasalah dilingkungan Program Pengembangan Informasi Kesehatan, dengan melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Mengendalikan kegiatan sehingga pelaksanaanya tepat waktu sesuai dengan rencana
 - b. Memperlancar dan mempercepat pencetakan buku profil kesehatan.
16. **Program Pengembangan Hukum Kesehatan** hanya terdapat 1 Proyek dan telah melapor. Berdasarkan laporan tersebut realisasi fisiknya masuk dalam interval 26--40% (tergolong lambat). Sementara itu daya serap anggarannya baru mencapai 36,17%.
- Berdasarkan laporan yang masuk tidak tercatat kendala yang menyebabkan rendahnya realisasi fisik dan daya serap anggaran.

17. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara** dari 18 (Pr/BP) yang melapor tepat waktu sebanyak 13 Pr/BP (72,2%). Berdasarkan laporan yang masuk terdapat 10 Pr/BP yang realisasi fisiknya masih dibawah 25% (sangat lambat) dan ada 1 Pr/BP yang baru mencapai 26 s/d 40% (lambat) sisanya telah mencapai 41 s/d 50% atau lebih (pencapaian ini dianggap wajar) sementara itu daya serap anggaran Rupiah Murni adalah 8,33% dan anggaran BLN baru mencapai 2,6% .

Berdasarkan laporan yang masuk tidak tercatat kendala yang menyebabkan rendahnya realisasi fisik dan daya serap anggaran.

18. **Program Peningkatan Efisiensi Aparatur Negara** dari 33 Pr/BP yang melapor tepat waktu sebanyak 29 Pr/BP (87,9%). Berdasarkan laporan yang masuk terdapat 7 Pr/BP yang realisasi fisiknya masih dibawah 25% (sangat lambat) dan ada 3 Pr/BP yang baru mencapai 26 s/d 40% (lambat) sisanya telah mencapai 41 s/d 50% atau lebih (pencapaian ini dianggap wajar) sementara itu daya serap anggaran Rupiah Muni adalah 36,39% dan anggaran BLN baru mencapai 3,5% .

Kendala yang menyebabkan rendahnya realisasi fisik dan keuangan berdasarkan laporan tersebut tercatat sebagai berikut :

- a. SK Pemimpin Proyek terlambat diterima
- b. Juklak dan Juknis belum diterima

Untuk pemecahan masalah rendahnya realisasi fisik dan keuangan tersebut maka disarankan kepada pengendali dan pelaksana program agar di Triwulan berikutnya berusaha meniadakan (mengeliminir) kendala-kendala tersebut terhadap proyek-proyek bermasalah dilingkungan Program Peningkatan Efisiensi Aparatur Negara, dengan melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Mempercepat proses dan distribusi SK Pimpro dan Bendaharawan
- b. Mempercepat penyusunan Juklak/Juknis yang disahkan oleh Sekretaris Jenderal serta memperlancar distribusinya kepada proyek-proyek yang bersangkutan.

19. **Program Pendayagunaan Sistem Pelaksanaan Pengawasan** (tidak ada proyek).

B. Perimbangan Realisasi Fisik dengan Realisasi Keuangan

Berdasarkan laporan Triwulan II proyek pembangunan Departemen Kesehatan tahun 1996/1997 diketahui bahwa prosentase daya serap anggaran (keuangan dan pencapaian target fisik tertimbang dalam interval 25% menurut jumlah Proyek/Bagian Proyek adalah sebagai berikut :

Tabel 1
PENCAPAIAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK
PROYEK PEMBANGUNAN DEPKES TRIWULAN II TH.1996/1997
Keadaan Per 15 November 1996.

PENCAPAIAN TARGET	KEUANGAN	FISIK
0 - 25%	449	329
26 - 50%	356	367
51 - 75%	97	195
76 - 100%	23	34
Jumlah Proyek/Bagian Proyek yang melapor	925	925

Tingkat pencapaian target fisik dan keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tingkat realisasi keuangan relatif seimbang dibanding tingkat realisasi fisik.
2. Pada Triwulan II, Pr/BP yang realisasi keuangannya dibawah 50% sebanyak 805 Pr/BP sedangkan PR/BP yang realisasi fisiknya dibawah 50% sebanyak 696 Pr/BP.
3. Pencapaian target realisasi keuangan, interval 51 -- 75%, dan 76 -- 100% masing-masing dicapai oleh 97 dan 34 Pr/BP, sedangkan untuk realisasi fisiknya masing-masing dicapai oleh 23 dan 34 Pr/BP.

C. Realisasi Anggaran Rupiah Murni

1. Menurut Program

Realisasi anggaran pembangunan Depkes Triwulan II tahun 1996/1997, bila disusun menurut Program dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.
REALISASI ANGGARAN RUPIAH MURNI DEPKES
TRIWULAN II THN. 1996/1997
DISUSUN MENURUT PROGRAM

	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN PEMBANGUNAN TA.1996/1997	JUMLAH ANGGARAN PR/BP YG MELAPOR	REALISASI	
				JUMLAH	%
Dalam Jutaan Rupiah					
I.	KELOMPOK PROGRAM POKOK				
1.	PENYULUHAN KES. MASY.	12.654,3	11.952,9	3.129,1	26,18
2.	PELAYANAN KESEHATAN MASY.	114.027,9	87.849,7	21.463,2	24,43
3.	YANKES RUJUKAN & RS	141.563,6	126.250,5	12.439,4	9,85
4.	P 2 M	123.400,9	117.225,8	54.905,2	46,84
5.	PERBAIKAN GIZI	18.127,7	17.183,1	1.971,6	11,47
6.	P O M	14.594,9	14.426,3	3.773,6	26,16
7.	BIN. PENGOBATAN TRADISIONAL	1.280,5	1.280,6	214,3	16,73
	JUMLAH PROG. POKOK	425.650,0	376.168,9	97.896,4	26,02
II.	KELOMPOK PROG. PENUNJANG				
8.	PPAB	7.218,4	6.988,4	1.373,8	19,66
9.	PKLP	5.296,9	5.124,1	1.069,2	20,87
10.	PENDIDIKAN KEDINASAN	42.332,8	37.998,7	12.990,3	23,95
11.	DIKLAT APARATUR NEGARA	7.677,5	7.103,4	1.887,2	26,57
12.	LITBANG KESEHATAN	5.224,2	5.224,3	872,1	16,69
13.	PEMBINAAN PEMUDA	508,9	508,9	176,1	34,60
14.	PERANAN WANITA	988,8	806,3	134,8	16,72
15.	PENGEMB. INFORMASI KES.	2.372,5	1.421,5	376,0	26,45
16.	PENGEMB. HUKUM KES.	553,1	553,1	200,0	36,17
17.	PENINGK. PRASARANA & SAR	3.472,4	2.923,3	243,7	8,33
18.	PENINGK. EFISIENSI	4.815,0	4.477,1	1.629,2	36,39
19.	PENDAYAGUNAAN SISTEM PELAKSANAAN PENGAWASAN	0,0	0,0	0,0	0,0
	JUMLAH PROGRAM UMUM	80.460,5	73.129,1	20.862,4	28,53
	JUMLAH	506.110,5	449.298,0	118.756,8	26,43

Keterangan:

Prosentase realisasi dihitung terhadap jumlah anggaran proyek bagian proyek yang melapor

Tabel 3.
REALISASI ANGGARAN PEMBANGUNAN DEPKES
TRIWULAN II THN. 1996/1997
DISUSUN MENURUT LOKASI

Dalam Jutaan Rupiah

L O K A S I	JUMLAH ANGGARAN RUPIAH MURNI TA. 1996/1997	JUMLAH ANGGARAN YANG MELAPOR	REALISASI	
			JUMLAH	%
J A W A	118.741,5	104.138,5	19.507,7	18,73
LUAR JAWA	241.024,5	213.096,1	15.620,2	21,41
JUMLAH DAERAH	359.766,0	317.234,6	65.127,9	20,53
P U S A T	146.344,5	132.063,4	53.630,9	40,61
JUMLAH SELURUH	506.110,5	449.298,0	118.758,8	26,43

Berdasarkan tabel 3 realisasi anggaran Pembangunan menurut Lokasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Distribusi anggaran Rupiah Murni Departemen Kesehatan dilihat berdasarkan lokasi ternyata di luar Jawa menempati urutan terbesar yaitu sekitar 47,6% dari seluruh anggaran yang ada, selanjutnya secara berurutan yaitu Pusat (28,9%) dan Jawa (23,5%).
- b. Jumlah realisasi berdasarkan Pr/BP yang melapor ternyata di Pusat menempati urutan tertinggi yaitu sebesar 40,61% selanjutnya secara berurutan adalah Jawa 18,73% dan Luar Jawa 21,41%.
- c. Jumlah Pr/BP berdasarkan lokasi yang belum melaporkan kemajuan proyek melalui laporan triwulan, adalah sebagai berikut :
 - 1) Terdapat 14 Pr/BP yang belum melaporkan dari 74 Pr/BP yang ada di Pusat atau sekitar 18,9%.
 - 2) Terdapat 40 Pr/BP yang belum melaporkan dari 290 Pr/BP yang ada di Jawa atau sekitar 13,8%.
 - 3) Terdapat 94 Pr/BP yang belum melaporkan dari 709 Pr/BP yang ada di Luar Jawa, atau sekitar 13,3%.

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa lokasi yang transportasi dan komunikasinya lancar tidak menjamin terhadap lancarnya pengiriman laporan triwulan kemajuan proyek.

Secara rinci dapat dilihat pada lampiran 2.

3. Menurut Unit Organisasi

Realisasi anggaran pembangunan Depkes Triwulan II Tahun 1996/1997, bila dilihat penjabarannya menurut Unit Organisasi terlihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.
REALISASI ANGGARAN PEMBANGUNAN DEPKES
TRIWULAN II THN. 1996/1997
DISUSUN MENURUT UNIT ORGANISASI

Dalam Jutaan Rupiah

	UNIT ORGANISASI	JUMLAH ANGG PEMBANGUNAN TA.1996/97	JML.ANGG PR/BP YG MELAPOR	REALISASI	
				JUMLAH	%
1.	SEKERTARIS JENDERAL	69.518,1	62.469,8	19.429,7	31,10
2.	INSPEKTORAT JENDERAL	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	DITJEN BINKESMAS	147.059,1	119.052,4	26.943,1	22,63
4.	DITJEN YANMEDIK	133.268,8	118.257,8	10.246,1	8,66
5.	DITJEN PPM & PLP	135.916,2	129.338,3	57.348,2	44,34
6.	DITJEN P O M	15.124,1	14.955,4	3.919,5	26,21
7.	BADAN LITBANGKES	5.224,3	5.224,3	872,2	16,69
	JUMLAH	506.110,5	449.298,0	118.758,8	26,43

Berdasarkan tabel 4, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Jumlah anggaran pembangunan berdasarkan Unit organisasi yang terbesar adalah Ditjen Binkesmas sebesar Rp.147.059,1 juta atau sekitar 29,1% dari seluruh anggaran pembangunan Depkes sedangkan jumlah anggaran terkecil terdapat pada Badan Litbangkes sebesar Rp.5.224,2 juta atau sekitar 1,0%
- b. Unit organisasi yang realisasinya dibawah angka rata-rata (26,43%) adalah:
 - 1) Ditjen Yanmedik, 8,66%
 - 2) Badan Litbangkes, 16,69%
 - 3) Ditjen Binkesmas, 22,63%
 - 4) Ditjen POM, 26,21%

Sedangkan unit organisasi lainnya berada diatas angka rata-rata.

Secara rinci dapat dilihat pada lampiran 3.

D. Anggaran Bantuan Luar Negeri

Anggaran Pembangunan Depkes RI tahun 1996/1997 yang mendapatkan Bantuan Luar Negeri pada triwulan II tercatat sebanyak 291 Proyek/Bagian Proyek termasuk Bantuan OECF INP - 19.

Satu obyek (Proyek/Bagian Proyek) ada yang mendapatkan lebih dari satu sumber pembiayaan Bantuan Luar Negeri contoh :

Proyek Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pusat mendapatkan Bantuan Luar Negeri dari OECF INP 19, IBRD 355 - IND Bila satu sumber pembiayaan untuk Proyek/Bagian Proyek ini disebut "Sub Obyek" maka Obyek dan Sub Obyek pada triwulan II ini berjumlah 350 dengan alokasi keseluruhan Rp.302.596.899.000,-

Dalam evaluasi ini selain 291 Proyek/Bagian Proyek atau 350 Obyek/Sub Obyek tahun 1996/1997 tercatat 15 Proyek/Bagian Proyek tahun 1995/1996 yang kegiatan dan pembiayaannya masih dilanjutkan dalam tahun 1996/1997. Data yang terkumpul dan diolah sebanyak 200 Obyek/Sub Obyek (57,14%).

Alokasi anggaran Current Budget tahun 1996/1997 seluruhnya adalah Rp 302.596.899.000,- jumlah alokasi terkumpul Rp 168.579.530.000,- realisasinya Rp.4.921.554.251,- (2,92%) Alokasi Carry Over tahun fiskal 1994/1995 adalah Rp.2.589.616.900,- realisasinya Rp 179.388.000,- (6,93%). Alokasi Carry Over tahun 1995/1996 adalah Rp 41.533.254.363,- realisasi nya Rp 19.194.889.344,- (46,21%).

Data lebih rinci tentang jumlah Obyek/Sub Obyek Bantuan Luar Negeri pada Depkes RI tahun 1996/1997 keadaan pada triwulan II pada lampiran 12.

1. Realisasi Anggaran Bantuan Luar Negeri Menurut Program.

Distribusi alokasi dan realisasi Bantuan Luar Negeri berdasarkan program-program Depkes RI pada triwulan II tahun 1996/1997 dapat dilihat pada lampiran 13. Berdasarkan informasi tersebut kemampuan daya serap realisasi Bantuan Luar Negeri dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Daya serap rata-rata Bantuan Luar Negeri untuk triwulan II tahun 1996/1997 masih sangat rendah yakni 2,92%. Realisasi Berdasarkan kelompok program, ternyata kelompok program penunjang berada diatas angka rata-rata, yaitu 5,76%, sedangkan kelompok program pokok masih dibawah angka rata-rata, yaitu 2,43%.

- b. Jumlah anggaran Bantuan Luar Negeri yang termasuk dalam kelompok program pokok adalah Rp.238.545,6 juta, jumlah anggaran yang melapor pada triwulan ke II adalah Rp.143.971,9 juta, realisasinya baru mencapai Rp.3.503,2 juta atau sekitar 2,43%. Jenis program yang termasuk dalam kelompok program pokok dimana daya serapnya masih rendah (dibawah 1%) adalah program Pelayanan Kesehatan Rujukan dan RS serta program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.
- c. Jumlah anggaran Bantuan Luar Negeri yang termasuk dalam kelompok program penunjang adalah Rp.64.051,3 juta, jumlah anggaran yang melapor pada triwulan ke II adalah Rp.24.607,6 juta, realisasinya baru mencapai Rp.1.418,6 juta atau sekitar 5,8%. Jenis program yang termasuk dalam kelompok program penunjang dimana daya serapnya masih rendah (dibawah 1%) adalah program Penyediaan dan Pengawasan Air Bersih serta program Peningkatan Kesehatan Lingkungan dan Pemukiman.

2. Realisasi Anggaran Bantuan Luar Negeri Menurut Provinsi

Distribusi dana Bantuan Luar Negeri menurut provinsi dapat dilihat dalam lampiran 14 dan 15. Berdasarkan informasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan laporan triwulan II, provinsi-provinsi yang merealisasikan dana BLN cukup tinggi adalah, Propinsi Nusa Tenggara Timur (16,21%); Jawa Barat (10,34%) dan Maluku (9,23%). Sampai dengan triwulan II, masih ada beberapa provinsi yang belum merealisasikan dana BLN, seperti, DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulut, Sultra, Sulsel, Sulteng, Bali, Bengkulu dan Timor Timur.
- b. Apabila dibandingkan dengan rata-rata daya serap Rupiah Murni, maka daya serap dana BLN masih relatif rendah (2,92%).
- c. Tingkat kesulitan transportasi atau komunikasi sebagai salah satu hambatan realisasi dana BLN, antara di Pulau Jawa dan di Luar Pulau Jawa, tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna, hal ini tercermin dari perimbangan tingkat realisasi berdasarkan lokasi yang relatif seimbang, sebagai berikut:
- | | |
|-------------|-------|
| - Jawa | 3,54% |
| - Luar Jawa | 2,99% |
| - Pusat | 2,68% |

3. Realisasi Anggaran BLN Menurut Unit Organisasi

Distribusi dana Bantuan Luar Negeri menurut unit organisasi dapat dilihat dalam lampiran 16. Berdasarkan informasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

- a. Unit organisasi yang merelaisasikan dana BLN paling tinggi adalah Sekretariat Jenderal (6,34%), sedangkan yang paling rendah adalah Ditjen Yanmedik yaitu baru mencapai 0,23%.
- b. Penerima Batuan Luar Negeri terbesar adalah Ditjen Binkesmas, yaitu Rp.112.758,- Juta untuk 106 obyek/sub obyek, sedangkan yang paling kecil adalah Ditjen PPM & PLP, yaitu Rp.23.330,8 Juta. Sedangkan Unit Organisasi yang tidak terdapat bantuan luar negeri adalah Inspektorat Jenderal dan Badan Litbangkes.

E. Evaluasi Kebenaran Laporan Triwulan Proyek

Hambatan yang paling dirasakan dalam pelaksanaan evaluasi laporan triwulan II Proyek Pembangunan yakni kelengkapan dan ketepatan laporan. Berdasarkan 925 laporan yang masuk dari 1073 Pr/BP atau sekitar 86,2%, dapat dipaparkan data kelengkapan dan kebenaran laporan sebagai berikut:

1. Terdapat 118 laporan (12,8%) yang salah dalam menghitung prosentase fisik atau menghitung realisasi keuangan.
2. Terdapat 107 laporan (11,6%) yang melaporkan triwulan tetapi tidak melampirkan Form B1-a dan Form A.
3. Terdapat 6 laporan yang laporannya disatukan dengan BLN, dan
4. Masih terdapat satu proyek yang menggunakan formulir lama.

Hasil evaluasi atau jenis kesalahan dalam mengerjakan laporan Proyek Pembangunan Depkes Triwulan II Tahun 1996/1997 dapat dilihat pada lampiran 11.

III. PENUTUP.

Pelaksanaan kegiatan dan daya serap anggaran proyek-proyek Depkes pada Triwulan II tahun 1996/1997, apabila dibandingkan dengan Triwulan I terdapat perbaikan yang menyangkut :

1. Adanya peningkatan jumlah Pr/BP yang melapor. Pada Triwulan II yang melapor sebanyak 925 Pr/BP (86,2%), sedangkan pada triwulan I hanya 803 Pr/BP (74,8%).
2. Pada triwulan II terjadi peningkatan pencapaian realisasi fisik, tercermin dari makin menurunnya jumlah Pr/BP yang realisasinya dikategorikan "sangat lambat". Pada triwulan I terdapat 569 Pr/BP atau sekitar 70,8%, sedangkan pada triwulan II terdapat 329 Pr/BP (35,6%) dari jumlah yang melapor. Dengan catatan kriteria "sangat lambat" pada triwulan I realisasi fisiknya masih di bawah 15% sedang pada triwulan II di bawah 25%.
3. Adanya perbaikan pada tingkat kesalahan pembuatan laporan, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Jumlah Pr/BP yang laporan triwulannya tidak melampirkan form B1-a dan form A, pada triwulan II jumlahnya menurun dibandingkan pada triwulan I, yaitu dari 124 menjadi 107 Pr/BP.
 - b. Pada triwulan II, sudah tidak ada lagi bagian proyek yang laporannya disatukan dengan induk proyek, sedang pada triwulan I masih terdapat 4 bagian proyek.

RANGKUMAN LAPORAN TRIWULAN PROYEK PEMBANGUNAN DEPKES RI TAHUN 1996/1997
 TRIWULAN II MENURUT PROGRAM
 (BERDASARKAN LAPORAN YANG DITERIMA ITJEN SAMPAI DENGAN 15 NOPEMBER 1996)

Lampiran 1

PROGRAM	JUMLAH SELURUH PR/ BP		JUMLAH YANG MELAPOR		TINGKAT REALISASI																JML ANGGARAN SELURUH PR / BP	JML ANGGARAN PR / BP YANG MELAPOR	REALISASI ANGGARAN PR / BP YANG MELAPOR			
					0 - 25%				26 - 50%				51 - 75%				76 - 100%						JUMLAH	%		
	PR	BP	PR	BP	PR	BP	PR	BP	PR	BP	PR	BP	PR	BP	PR	BP	PR	BP	PR	BP						
I. PROGRAM POKOK	214	480	196	397	118	206	79	146	55	169	79	176	23	14	34	64	0	8	4	11	425,649,979,000	376,168,856,000	97,896,377,397,000	26.02		
I.1. PENYULUHAN KESEHATAN MASYARAKAT	28	31	28	28	9	15	6	14	11	13	7	6	2	6	7	0	0	1	0	0	12,654,340,000	11,932,915,000	3,129,100,007,000	26.18		
I.2. PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	28	318	24	248	14	116	11	76	6	123	10	136	4	7	3	34	0	2	0	2	114,027,917,000	87,849,702,000	21,463,242,481,000	24.43		
I.3. PELAYANAN KESEHATAN RUFUKAN & RS	73	84	66	77	31	56	32	41	10	12	22	12	5	3	11	16	0	6	1	8	141,563,574,000	126,250,459,000	12,439,357,621,000	9.85		
I.4. PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN PENY.	28	6	25	5	12	1	6	1	8	4	9	4	5	0	9	0	0	0	1	0	123,400,918,000	117,225,760,000	54,905,254,700,000	46.84		
I.5. PERBAIKAN GIZI	28	1	26	1	18	1	14	0	7	0	9	1	1	0	2	0	0	0	1	0	18,127,665,000	17,183,099,000	1,971,573,022,000	11.47		
I.6. PENGAWASAN OBAT & MAKANAN	28	35	28	33	13	14	9	12	13	17	16	13	2	2	7	0	0	0	1	0	14,354,924,000	14,436,280,000	3,773,538,416,000	26.16		
I.7. PEMBINAAN PENGOBATAN TRADISIONAL	1	5	1	5	1	3	1	2	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1,280,641,000	1,280,641,000	214,290,930,000	16.73		
II. PROGRAM PENUNJANG	119	260	111	221	57	68	42	62	43	89	47	65	11	49	22	75	0	15	0	19	80,460,513,000	73,129,102,000	20,862,419,188,000	28.53		
II.8. PENYEDIAAN & PENGELOLAAN AIR BERSIH	28	0	27	0	14	0	8	0	10	0	15	0	1	0	4	0	0	0	0	0	7,218,438,000	6,988,438,000	1,373,746,699,000	19.66		
II.9. PENYEHATAN LINGKUNGAN & PEMUKIMAN	28	4	27	3	13	1	9	1	13	1	12	1	1	1	6	1	0	0	0	0	3,296,858,000	5,124,096,000	1,069,225,452,000	20.87		
II.10. PENDIDIKAN KEDINASAN	28	137	23	121	15	24	11	22	9	50	10	37	1	32	4	49	0	12	0	13	42,332,817,000	37,998,667,000	12,900,324,418,000	33.95		
II.11. PENDIDIKAN & PELATIHAN APARAT NEG.	27	4	23	3	10	1	10	1	7	1	7	0	8	0	8	1	0	1	0	1	7,877,649,000	7,103,443,000	1,887,223,683,000	26.57		
II.12. PENELITIAN & PENGEMBANGAN KES.	1	7	1	7	1	1	1	1	0	3	0	3	0	1	0	3	0	0	0	0	3,324,246,000	5,324,246,000	872,139,359,000	16.69		
II.13. PEMBINAAN & PENGEMBANGAN PEMUDA	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,883,000	308,883,000	176,067,800,000	34.60		
II.14. PENINGKATAN PERANAN WANITA	1	27	1	20	1	15	1	12	0	3	0	3	0	2	0	2	0	0	0	1	988,843,000	806,342,000	134,783,300,000	16.72		
II.15. PENGEMBANGAN INFORMASI KESEHATAN	1	33	0	28	0	13	0	10	0	9	0	8	0	6	0	8	0	0	0	2	2,372,432,000	1,431,501,000	375,960,251,000	26.45		
II.16. PENGEMBANGAN HUKUM KESEHATAN	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,118,000	53,118,000	200,047,047,000	36.17		
II.17. PENINGK. PRAS. & SAR. APARATUR NEG.	1	17	1	12	1	9	1	9	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	3,472,446,000	2,923,321,000	243,837,893,000	8.33		
II.18. PENINGK. EFISIENSI APARATUR NEG.	2	31	2	27	0	4	1	6	2	16	1	10	0	6	0	10	0	1	0	1	4,814,963,000	4,477,047,000	1,629,233,266,000	36.39		
II.19. PENDAYAGUNAAN SISTEM & PELAKS. WAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000,000	0,000,000	0,000,000,000	0.00
JUMLAH SELURUH	333	740	307	618	175	274	121	208	98	258	126	241	34	63	56	119	0	21	0	30	506,110,492,000	449,397,938,000	119,758,396,585,000	26.43		

Sumber Data : Daftar Program, Program (P) 1-14

RANGKUMAN LAPORAN TRIWULAN PROYEK PEMBANGUNAN DEPKES RI TAHUN 1996/1997
 TRIWULAN II MENURUT PROVINSI
 (BERDASARKAN LAPORAN YANG DITERIMA ITJEN SAMPAI DENGAN 15 NOPEMBER 1996)

PROVINSI	JUMLAH SELURUH PRBP		JUMLAH YANG MELAPOR				TINGKAT REALISASI																JML ANGGARAN SELURUH PR/BP	JML ANGGARAN PR/BP YANG MELAPOR	REALISASI ANGGARAN PR/BP YANG MELAPOR	
					0 - 25%				26 - 50%				51 - 75%				76 - 100%				PR/BP	MELAPOR			JUMLAH	%
	PR	BP	PR	BP	PR	BP	PR	BP	PR	BP	PR	BP	PR	BP	PR	BP	PR	BP								
DKI JAKARTA	15	25	14	17	10	7	7	6	4	7	6	5	0	2	1	5	0	1	0	1	26,324,235,000	23,636,915,000	1,943,730,323.00	8.22		
JAWA BARAT	13	58	11	48	6	24	4	14	4	13	3	17	1	8	3	14	0	3	1	3	27,016,772,000	20,270,584,000	5,248,913,845.00	25.89		
JAWA TENGAH	13	59	12	42	10	22	9	13	2	18	2	22	0	0	1	4	0	2	0	3	27,528,591,000	23,221,117,000	2,982,539,554.00	12.84		
DI YOGYAKARTA	12	14	11	14	5	5	3	3	4	8	4	6	2	1	4	5	0	0	0	0	8,998,593,000	8,136,589,000	1,645,184,668.00	20.22		
JAWA TIMUR	12	69	12	69	5	18	4	11	5	36	4	29	2	12	4	25	0	3	0	4	28,873,289,000	28,873,289,000	7,687,373,432.00	26.62		
DI ACEH	11	27	10	22	5	10	7	10	3	9	3	5	2	1	0	5	0	2	0	2	14,021,044,000	13,238,688,000	3,376,548,231.00	25.51		
SUMATERA UTARA	12	31	12	31	4	8	1	6	7	19	10	15	1	3	1	9	0	1	0	1	17,166,410,000	17,166,410,000	3,463,011,215.00	20.17		
SUMATERA BARAT	12	25	12	25	8	15	5	8	3	8	5	12	1	2	1	5	0	0	1	0	15,261,175,000	15,261,175,000	2,591,005,780.00	16.98		
RIA U	11	20	11	20	8	10	2	8	3	8	6	8	0	1	3	2	0	1	0	2	10,846,949,000	10,846,949,000	1,834,528,620.00	16.91		
J A M B I	11	17	11	13	5	5	4	5	3	4	4	3	3	2	2	3	0	2	1	2	6,822,847,000	5,872,422,000	1,648,004,793.00	28.06		
SUMATERA SELATAN	12	23	12	23	8	9	4	11	3	13	6	9	1	1	2	3	0	0	0	0	13,394,313,000	13,394,313,000	2,441,950,406.00	18.23		
LAMPUNG	11	19	11	19	6	6	2	5	3	6	7	5	2	5	2	4	0	2	0	5	8,708,095,000	8,708,095,000	2,424,735,879.00	27.84		
KALIMANTAN BARAT	11	21	11	19	8	14	6	11	2	4	4	5	1	0	1	3	0	1	0	0	9,120,058,000	8,198,598,000	1,517,105,954.00	18.50		
KALIMANTAN TENGAH	11	14	11	11	2	2	2	2	5	7	5	7	4	2	4	2	0	0	0	0	9,138,873,000	8,538,758,000	2,762,153,347.00	32.35		
KALIMANTAN SELATAN	11	23	10	23	4	10	1	8	3	12	5	9	3	1	4	6	0	0	0	0	9,082,164,000	8,861,570,000	2,759,861,135.00	31.60		
KALIMANTAN TIMUR	11	17	10	12	9	8	4	7	1	4	5	4	0	0	1	1	0	0	0	0	9,071,474,000	8,147,905,000	997,410,909.00	12.24		
SULAWESI UTARA	12	20	12	20	12	13	10	10	0	6	1	8	0	1	1	2	0	0	0	0	12,085,227,000	12,085,227,000	1,262,685,732.00	10.45		
SULAWESI TENGAH	11	14	11	10	4	4	3	2	5	1	1	2	2	5	7	4	0	0	0	2	8,291,254,000	6,660,244,000	1,608,885,662.00	24.16		
SULAWESI SELATAN	12	35	12	35	6	13	4	6	5	21	7	21	1	1	1	8	0	0	0	0	16,115,678,000	16,115,678,000	3,237,029,582.00	20.09		
SULAWESI TENGGARA	11	14	10	8	4	3	1	1	6	3	8	2	0	2	1	5	0	0	0	0	6,831,668,000	5,642,423,000	1,406,701,678.00	24.93		
MALUKU	11	17	10	11	6	4	6	6	2	6	1	3	2	0	3	1	0	1	0	1	10,422,779,000	7,476,197,000	2,537,023,806.00	33.93		
BALI	12	18	12	17	7	7	2	3	3	6	4	7	2	3	5	4	0	1	1	3	7,779,653,000	7,652,359,000	1,938,980,400.00	25.34		
NUSA TENGGARA BARAT	11	16	7	10	4	6	4	6	2	3	2	2	1	1	1	2	0	0	0	0	7,732,005,000	3,058,550,000	667,585,651.00	21.83		
NUSA TENGGARA TIMUR	11	23	8	15	4	9	6	8	4	5	2	6	0	1	0	1	0	0	0	0	11,474,222,000	7,990,288,000	1,089,713,232.00	13.64		
IRIAN JAYA	11	31	10	14	8	9	7	9	1	2	3	3	1	1	0	2	0	2	0	0	14,326,962,000	9,232,456,000	2,371,705,110.00	25.69		
BENGKULU	11	15	11	16	4	5	1	3	5	6	7	7	2	4	3	5	0	1	0	1	13,095,352,000	13,095,352,000	2,429,624,659.00	18.55		
TIMOR TIMUR	11	20	6	11	2	5	1	4	4	4	5	3	0	2	0	4	0	0	0	0	10,236,337,000	5,852,400,000	1,213,917,167.00	20.74		
JUMLAH DAERAH	313	686	290	575	164	251	110	186	92	239	120	225	34	62	56	134	0	23	4	30	359,766,029,000	317,234,561,000	65,127,910,770.00	20.53		
PUSAT	20	54	17	43	11	23	11	22	6	19	6	16	0	1	0	5	0	0	0	0	146,344,463,000	132,063,397,000	53,630,885,815.00	40.61		
JUMLAH SELURUH	333	740	307	618	175	274	121	208	98	258	126	241	34	63	56	139	0	23	4	30	506,110,492,000	449,297,958,000	118,758,796,585.00	26.43		

RANGKUMAN LAPORAN TRIWULAN PROYEK PEMBANGUNAN DEPKES RI TAHUN 1996/1997
 TRIWULAN II MENURUT UNIT ORGANISASI
 (BERDASARKAN LAPORAN YANG DITERIMA ITJEN SAMPAI DENGAN 15 NOPEMBER 1996)

UNT ORGANISASI	TINGKAT REALISASI																				JML. ANGGARAN SELURUH PR/BP	JML. ANGGARAN PR/BP YANG MELAPOR	REALISASI ANGGARAN PR/BP YANG MELAPOR	
	Jumlah yang Melapor				0 - 25%				26 - 50%				51 - 75%				76 - 100%						Jumlah	%
	Jumlah seluruh PR/BP		Jumlah yang Melapor		Biaya		Fisik		Biaya		Fisik		Biaya		Fisik		Biaya		Fisik					
	PR	BP	PR	BP	PR	BP	PR	BP	PR	BP	PR	BP	PR	BP	PR	BP	PR	BP	PR	BP				
SEKRETARIAT JENDERAL	88	225	81	194	39	53	31	50	29	81	32	57	13	45	18	69	0	15	0	18	69,518,066,000	62,469,775,000	19,429,715,862.00	31.10
INSPEKTORAT JENDERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	-
DITJEN BINKESMAS	87	381	79	301	43	150	33	104	25	138	33	151	11	11	11	43	0	2	2	3	147,059,145,000	119,052,438,000	26,943,117,160.00	22.63
DITJEN YANMEDIK	45	31	39	74	38	54	24	39	0	11	9	11	1	3	5	16	0	6	1	8	133,268,753,000	118,257,781,000	10,246,088,537.00	8.66
DITJEN PPM & PLP	84	10	79	8	41	2	23	2	31	5	36	5	7	1	19	1	0	0	1	0	135,916,214,000	129,338,294,000	57,348,226,851.00	44.34
DITJEN POM	28	36	28	34	13	14	9	12	13	18	16	14	2	2	3	7	0	0	0	1	15,124,068,000	14,955,424,000	3,919,508,816.00	26.21
BADAN LITBANGKES	1	7	1	7	1	1	1	1	0	5	0	3	0	1	0	3	0	0	0	0	5,224,246,000	5,224,246,000	872,139,359.00	16.69
Jumlah seluruh	333	740	307	618	175	274	121	208	98	258	126	241	34	63	56	139	0	23	4	30	506,110,492,000	449,297,958,000	318,758,796,585.00	26.43

**DAFTAR PROYEK /BAGIAN PROYEK YANG LAPORANYA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 1996/1997
BELUM DITERIMA INSPEKTORAT JENDERAL DEPKES**

WILAYAH/PROPINSI	PROYEK/BAGIAN PROYEK
PUSAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pr. Peningkatan Yankesmas Pusat 2. Pr. Peningkatan Pelayanan Medik Pusat 3. Pr. Peningkatan Sistem Informasi Kes. Masyarakat. 4. BP. Peningkatan Pelayanan RSUD & Pendidikan 5. BP. Peningkatan Kesehatan Keluarga Pusat 6. BP. Pengembangan Pendayagunaan Bidan Pusat 7. BP. Sekretariat ADB III 8. BP. Pengembangan Penyakit Kelamin & AIDS 9. BP. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Ditjen P2M PLP 10. BP. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Ditjen POM 11. BP. Prasarana Fisik Ditjen POM 12. BP. Peningkatan Pengendalian Lingkungan Kesehatan 13. BP. Penyempurnaan Sistem Anggaran & Biaya 14. BP. Peningkatan Yankes Terpadu IV (IBRD)
DKI JAKARTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pr. Peningkatan Yankesmas Prop. DKI 2. BP. Peningkatan Yankesmas Jakarta Pusat 3. BP. Peningkatan Yankesmas Jakarta Selatan 4. BP. Peningkatan Yankesmas Jakarta Timur 5. BP. Peningkatan Yankesmas Jakarta Utara 6. BP. Peningkatan Balai Tehnik Kesehatan Lingkungan 7. BP. Peningkatan Peranan Wanita 8. BP. Prasarana Fisik 9. BP. Peningkatan Pendidikan Bidan SPK Fatmawati
JAWA BARAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pr. Pelayanan Kesehatan Rujukan & RS 2. Pr. Pendidikan Tenaga Kesehatan Jabar.

WILAYAH/PROPINSI	PROYEK/BAGIAN PROYEK	
	3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.	BP. Peningkatan Yankesmas Kab Sukabumi BP. Peningkatan Yankesmas Kab Ciamis BP. Peningkatan Yankesmas Kab Garut BP. Peningkatan Yankesmas Kab Karawang BP. Peningkatan Yankesmas Kab Bekasi BP. Peningkatan Yankesmas Kodya Dati II Bandung BP. RSUD Gunung Jati Cirebon BP. Peningkatan Pendidikan Bidan SPK Garut BP. Peningkatan Pendidikan Bidan SPK Cianjur BP. Pendidikan & Latihan Lemah Abang
JAWA TENGAH	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.	Pr. Pelayanan Laboratorium Kesehatan BP. Peran Serta Masyarakat BP. Peningkatan Yankesmas Kodya Tegal BP. Peningkatan Yankesmas Kodya Pekalongan BP. Peningkatan Yankesmas Kab Wonosobo BP. Peningkatan Yankesmas Kab Kebumen BP. Peningkatan Yankesmas Kab Pemalang BP. Peningkatan Yankesmas Kab Tegal BP. Peningkatan Yankesmas Kab Semarang BP. Peningkatan Yankesmas Kab Demak BP. Peningkatan Yankesmas Kab Pati BP. Peningkatan Yankesmas Kab Jepara BP. Peningkatan Yankesmas Kab Seragen BP. Peningkatan Yankesmas Kab Karang Anyar BP. Peningkatan Yankesmas Kab Sukoharjo BP. Peningkatan Yankesmas Kab Kendal BP. Peningkatan Pendidikan Bidan SPK Kariadi BP. Peningkatan Peranan Wanita
DI. YOGYAKARTA	1.	Pr. Pelayanan Rujukan & Rumah Sakit
DI. ACEH	1. 2.	Pr. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Pr. Pengendalian & Pengawasan Obat Makanan

WILAYAH/PROPINSI	PROYEK/BAGIAN PROYEK
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Bp. Peningkatan Yankesmas Kodya Aceh 4. Bp. Peningkatan Yankesmas Kodya Sabang 5. Bp. Peningkatan Yankesmas Kab Aceh Tenggara 6. BP. Peran Serta Masyarakat
JAMBI	<ol style="list-style-type: none"> 1. BP. Peningkatan Yankesmas Kab Kerinci 2. Bp. Peningkatan Yankesmas Kab Bungotebo 3. Bp. Peningkatan Yankesmas Kab Batanghari 4. BP. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
KALIMANTAN BARAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. BP. Peningkatan Yankesmas Kab Sintang 2. BP. Peningkatan Yankesmas Kab Kapuas Hulu
KALIMANTAN TENGAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. BP. Peningkatan Yankesmas Kab Kapuas 2. BP. Peningkatan Peranan Wanita 3. BP. Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan
KALIMANTAN SELATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pr. Peningkatan Yankesmas Prop. Kalsel
KALIMANTAN TIMUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pr. Pendidikan & Latihan Pegawai 2. BP. Peningkatan Yankesmas Kab Balikpapan 3. BP. Peningkatan Yankesmas Kab Pasir 4. BP. Peningkatan Yankesmas Kab Bulungan 5. BP. Peningkatan RSUD Balikpapan 6. BP. Peningkatan Peranan Wanita
SULAWESI TENGAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. BP. Peningkatan Yankesmas Kodya Palu 2. BP. Peningkatan Yankesmas Kab Donggala 3. BP. Peningkatan Yankesmas Kab Banggai 4. BP. Peningkatan Yankesmas Kab Toli-Toli

WILAYAH/PROPINSI	PROYEK/BAGIAN PROYEK	
SULAWESI TENGGARA	1.	Pr. Perbaikan Gizi
MALUKU	2.	BP. Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan
	3.	BP. Prasarana Fisik Fasilitas Kerja
	4.	BP. Perencanaan Umum Kesehatan
	5.	BP. Pendidikan Bidan SPK Kendari
	6.	BP. Peningkatan Yankesmas Kab. Muna
	7.	BP. Peningkatan Yankesmas Kab. Kolaka
		1.
BALI	2.	BP. Peningkatan RSUD Ambon
	3.	BP. Peningkatan Yankes Jiwa
	4.	BP. Peningkatan Pendidikan Bidan SPKTual
	5.	BP. Peningkatan Pendidikan Bidan SPK Ambon
	6.	BP. Peningkatan Peranan Wanita
	7.	BP. Peningkatan Yankesmas Kab. Maluku Utara
		1.
NUSA TENGGARA BARAT	1.	Pr. Peningkatan Kesehatan Lingkungan & Pemukiman
	2.	Pr. Pendidikan Tenaga Kesehatan
	3.	Pr. Pemberantasan Penyakit Menular
	4.	Pr. Pelayanan Kesehatan Rujukan & RS
	5.	BP. Peningkatan Pendidikan AKZI Mataram
	6.	BP. Peningkatan Yankesmas Kab Lombok Tengah
	7.	BP. Peningkatan Yankesmas Kan Lombok Timur
	8.	BP. Peningkatan Yankesmas Kab/Kodya Sumbawa
	9.	BP. Peningkatan Yankesmas Kab Dompu
	10.	BP. Perencanaan Umum Kesehatan
NUSA TENGGARA TIMUR	1.	Pr. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat
	2.	Pr. Peningkatan Yankesmas Prop. NTT
	3.	Pr. Pemberantasan Penyakit Menular

WILAYAH/PROPINSI	PROYEK/BAGIAN PROYEK	
IRIAN JAYA	4. Bp. Peningkatan Yankesmas Kab. Timor Tengah Utara 5. BP. Peningkatan Yankesmas Kab Flores Timur 6. BP. Peningkatan Yankesmas Kab Ende 7. BP. Peningkatan Yankesmas Kab Format 8. BP. Peningkatan RSUD Dr. WZ. Yohanes 9. BP. Sarana Penyimpanan Obat Mak. Alat Kesehatan 10. BP. Peningkatan Pendidikan Bidan SPK Ende 11. BP. Peningkatan Peranan Wanita	
	1. BP. Peran Serta Masyarakat 2. BP. Peningkatan Yankesmas Kodya Jaya Pura 3. BP. Peningkatan Yankesmas Kab Biak Numfor 4. BP. Peningkatan Yankesmas Kab Yapen Waropen 5. BP. Peningkatan Yankesmas Kab Manukwari 6. BP. Peningkatan Yankesmas Kab Sorong 7. BP. Peningkatan Yankesmas Kab Fakfak 8. BP. Peningkatan Yankesmas Kab Merauke 9. BP. Peningkatan Yankesmas Kab Paniae 10. BP. Peningkatan Yankesmas Kab Jaya Pura 11. BP. Peningkatan Bidan SPK Jaya Pura 12. BP. Peningkatan Bidan SPK Manokwari 13. BP. Peningkatan Bidan SPK Nabire 14. BP. Peningkatan Bidan SPK Biak 15. BP. Peningkatan Bidan SPK Wamena 16. BP. Peningkatan Bidan SPK Fakfak 17. BP. Peningkatan Bidan SPK Serui 18. BP. Prasarana Fisik Fasilitas Kerja	
	TIMOR TIMUR	1. Pr. Peningkatan Pelayanan Rujukan & RS 2. Pr. Perbaikan Gizi 3. Pr. Penyediaan & Pengawasan Air Bersih 4. Pr. Pendidikan & Latihan Pegawai 5. BP. Peningkatan Yankesmas Kab Ambeno 6. BP. Peningkatan Yankesmas Kab Kovalima 7. BP. Peningkatan Yankesmas Kab Bobonaro 8. BP. Peningkatan Yankesmas Kab Liquisa 9. BP. Peningkatan Yankesmas Kab Ermera 10. BP. Peningkatan Yankesmas Kab Atileu

WILAYAH/PROPINSI	PROYEK/BAGIAN PROYEK	
	11. 12. 13. 14.	BP. Peningkatan Yankesmas Kab Atileu BP. Peningkatan Yankesmas Kab Manufahi BP. Peningkatan Yankesmas Kab Bacau BP. Peningkatan Peranan Wanita

DISPERPUSIP JATIM

**DAFTAR PROYEK /BAGIAN PROYEK TH. 1996/1997
YANG LAPORAN TRIWULAN II BELUM DITERIMA ITJEN DEPKES
DATA DIAMBIL DARI TRIWULAN SEBELUMNYA**

WILAYAH/PROPINSI	PROYEK/BAGIAN PROYEK
PUSAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pr. Pengembangan Pengobatan Tradisional 2. Pr. Penyediaan & Pengawasan Air Bersih 3. Pr. Peningkatan Kesehatan Lingkungan & Pemukiman 4. Pr. Pendidikan Tenaga Kesehatan 5. Pr. Pendidikan & Pelatihan Pegawai 6. BP. Pelayanan Kesehatan Dasar 7. BP. Pengembangan RS Swasta & Khusus 8. BP. Pengembangan Tenaga Bidan 9. BP. Pengembangan Pendidikan Perawat Kesehatan 10. BP. Pengembangan Pendidikan Tenaga Gizi 11. BP. Pengembangan Pendidikan Tenaga Sanitasi 12. Bp. Pengembangan Penelitian Bidang Ekologi
DKI JAKARTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pr. Penyediaan & Pengawasan Air Bersih 2. BP. Peran Serta Masyarakat 3. BP. Peningkatan BPFK
JAWA BARAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pr. Pengendalian & Pengawasan Obat Makanan 2. BP. Peningkatan Yankesmas Kab Bandung 3. BP. Peningkatan Yankesmas Kab Sumedang 4. BP. Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan
JAWA TENGAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pr. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat 2. Pr. Pemberantasan Penyakit Menular 3. Pr. Perbaikan Gizi 4. Pr. Penyediaan & Pengawasan Air Bersih 5. BP. Peningkatan Yankesmas Kab Kudus 6. BP. Pengembangan RSUD Dr. Moewardi

WILAYAH/PROPINSI	PROYEK/BAGIAN PROYEK	
DI YOGYAKARTA	7. 8.	BP. Peningkatan Pendidikan Bidan SPK Klaten BP. Perencanaan Umum Kesehatan
JAWA TIMUR	1. 2.	Pr. Pengendalian & Pengawasan Obat Makanan BP. Peningkatan Yankesmas Kab Gunung Kidul
DI ACEH	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Pr. Perbaikan Gizi Pr. Penyediaan & Pengawasan Air Bersih BP. Peran Serta Masyarakat BP. Peningkatan Yankesmas Kab Pamekasan BP. Peningkatan Yankesmas Kab Pacitan BP. Peningkatan Yankesmas Kodya Porbolonggo BP. Peningkatan Peranan Wanita
SUMATERA BARAT	1. 2. 3. 4.	Pr. Peningkatan Kesehatan Lingkungan & Pemukiman Pr. Pemberantasan Penyakit Menular BP. Peningkatan Yankesmas Kab Aceh Utara BP. Peningkatan Pendidikan Bidan SPK Langsa BP. Peningkatan Pendidikan Bidan SPK Loksheimawe BP. Peningkatan Peranan Wanita BP. Prasarana Fisik Fasilitas Kerja
RIAU	1. 2. 3. 4.	BP. Peningkatan Yankesmas Kab Solok BP. Peningkatan Yankesmas Kodya Solok BP. Peningkatan Pendidikan Bidan SPK Padang BP. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Pr. Peningkatan Yankesmas Prop. Riau BP. Peningkatan Yankesmas Kab Kampar BP. Peningkatan Yankesmas Kab Indragiri Hulu BP. Peningkatan Kesehatan Lingkungan Pemukiman Batam

WILAYAH/PROPINSI	PROYEK/BAGIAN PROYEK
J A M B I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pr. Pemberantasan Penyakit Menular 2. Pr. Peningkatan Kesehatan Lingkungan & Pemukiman 3. Pr. Peningkatan Yankesmas Prop. Jambi 4. BP. Peningkatan Yankesmas Kab Sarolangun 5. BP. Peningkatan Yankesmas Kab Tanjung Jabung 6. BP. Peran Serta Masyarakat 7. BP. Peningkatan Peranan Wanita
SUMATERA SELATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pr. Pemberantasan Penyakit Menular 2. BP. Peningkatan Yankesmas Kab OKU 3. BP. Peningkatan Yankesmas Kab Belitung 4. BP. Peningkatan Yankesmas Kab Bangka
KALIMANTAN BARAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pr. Peningkatan Yankesmas Prop. Kalbar 2. Pr. Pemberantasan Penyakit Menular 3. Pr. Pengendalian & Pengawasan Obat dan Makanan 4. Pr. Pendidikan & Pelatihan Pegawai 5. BP. Peningkatan Yankesmas Kab. Pontianak 6. BP. Peningkatan Yankesmas Kab. Ketapang 7. BP. Peningkatan Yankesmas Kodya Pontianak 8. BP. Peningkatan Yankes Jiwa Pontianak 9. BP. Peningkatan Kesehatan Gigi 10. BP. Peningkatan Pendidikan SPPH 11. BP. Peningkatan Pendidikan Bidan SPK Singkawang 12. BP. Peningkatan Peranan Wanita
KALIMANTAN TENGAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. BP. Peran Serta Masyarakat
KALIMANTAN SELATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pr. Peningkatan Pendidikan Tenaga Kesehatan 2. BP. peningkatan Sarana Penyimpanan Obat 3. BP. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

WILAYAH/PROPINSI	PROYEK/BAGIAN PROYEK	
KALIMANTAN TIMUR	1.	Pr. Peningkatan Pelayanan Rujukan & RS
	2.	BP. Peningkatan Yankesmas Kab Balikpapan
	3.	BP. Peningkatan Yankesmas Kab Pasir
	4.	BP. Peningkatan Yankesmas Kab Bulungan
	5.	BP. Peningkatan Sarana Obat & Makanan
SULAWESI UTARA	1.	Pr. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat
	2.	Pr. Pelayanan Kesehatan Rujukan & RS
	3.	Pr. Pemberantasan Penyakit Menular
	4.	Pr. Perbaikan Gizi
	5.	Pr. Pengendalian & Pengawasan Obat Makanan
	6.	Pr. Penyediaan & Pengawasan Air Bersih
	7.	Pr. Peningkatan Kesehatan Lingkungan & Pemukiman
	8.	Pr. Pendidikan Tenaga Kesehatan
	9.	Pr. Pendidikan & Pelatihan Pegawai
	10.	Pr. Peningkatan Yankesmas Prop. Sulut
	11.	BP. Peningkatan Yankesmas Kodya Manado
	12.	BP. Peningkatan Yankesmas Kab Minahasa
	13.	BP. Peningkatan Yankesmas Kab Gorontalo
	14.	BP. Peningkatan Yankesmas Kab Sangirtalaut
	15.	BP. Peran Serta Masyarakat
	16.	BP. Peningkatan Kesehatan Gigi
	17.	BP. Pengembangan Pengobatan Tradisional
	18.	BP. Pendidikan APK Manado
	19.	BP. Peningkatan Bidan SPK Manado
	20.	BP. Peningkatan Peranan Wanita
	21.	BP. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
	22.	BP. Perencanaan Umum Kesehatan
SULAWESI TENGAH	1.	Pr. Peningkatan Yankes Rujukan & RS
	2.	Pr. Perbaikan Gizi
	3.	BP. Yankesmas Kab Poso
	4.	BP. Peningkatan RSUD Undata Palu

WILAYAH/PROPINSI	PROYEK/BAGIAN PROYEK	
SULAWESI SELATAN	1.	Pr. Peningkatan Kesehatan Lingkungan & Pemukiman
	2.	BP. Peningkatan Yankesmas Kab Tana Toraja
SULAWESI TENGGARA	1.	BP. Peningkatan Peranan Wanita
MALUKU	2.	BP. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
BALI	1.	Pr. Pendidikan & Pelatihan Pegawai
	2.	BP. Peningkatan Pendidikan Bidan SPK Denpasar
NUSA TENGGARA BARAT	1.	Pr. Pendidikan & Pelatihan Pegawai
	2.	BP. Peningkatan Pendidikan Bidan SPK Bima
	3.	BP. Peran Serta Masyarakat
	4.	BP. Peningkatan Sarana POM
NUSA TENGGARA TIMUR	1.	Pr. Pendidikan & Pelatihan Pegawai
	2.	BP. Peningkatan Yankesmas Kab Manggarai
	3.	BP. Peningkatan Yankesmas Kab Sumba Timur
	4.	BP. Peningkatan Yankesmas Kab. Belu
	5.	BP. Peningkatan Yankesmas Kab. Alor
IRIAN JAYA	6.	BP. Peningkatan Pendidikan SPK Kupang
	1.	Pr. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat
	2.	Pr. Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan
	3.	Pr. Perbaikan Gizi
	4.	Pr. Peningkatan Yankesmas Prop. Irja
	5.	BP. Peningkatan Yankes Daerah Asmad
	6.	BP. Peningkatan Yankesmas Kab. Jaya Wijaya
	7.	BP. Peningkatan Sarana Penyimpanan Obat
	8.	BP. Peningkatan Pendidikan Swakarsa
	9.	BP. Peningkatan Pendidikan Bidan SPK Sorong

**DAFTAR PROYEK /BAGIAN PROYEK YANG MENGIRIM LAPORAN
TRIWULAN II DENGAN MENGGUNAKAN FORM LAMA**

WILAYAH/PROPINSI	PROYEK/BAGIAN PROYEK	
JAWA TENGAH	1.	BP. Peningkatan Yankes Jiwa Magelang

DISPERPUSIP JATIM

**DAFTAR PROYEK /BAGIAN PROYEK YANG MENGIRIM LAPORAN
TRIWULAN II TETAPI TIDAK MELAMPIRKAN FORM B1-a**

WILAYAH/PROPINSI	PROYEK/BAGIAN PROYEK	
PUSAT	1.	BP. Penelitian Bidang Pelayanan Kesehatan
JAWA BARAT	1.	BP. Peningkatan Yankesmas Kab Bogor
JAWA TIMUR	1. 2. 3.	BP. Peningkatan Yankesmas Kodya Madiun BP. Peningkatan Yankesmas Kab Lumajang BP. Peningkatan Yankesmas Kab Jombang
SUMATERA BARAT	1.	BP. Peningkatan Yankesmas Kab Sawahlunto
SUMATERA SELATAN	1.	BP. Peran Serta Masyarakat
LAMPUNG	1.	Pr.Pengendalian & Pengawasan Obat Makanan
KALIMANTAN BARAT	1.	BP. Peningkatan RS. Jiwa Singkawang
SULAWESI SELATAN	1. 2.	BP. Peningkatan Yankesmas Kab Luwu BP. Peningkatan Yankesmas Kab Majene
BALI	1.	BP. Sarana Pengendalian Obat Makanan
IRIAN JAYA	1.	Pr. Pelayanan Rujukan & RS

WILAYAH/PROPINSI	PROYEK/BAGIAN PROYEK	
TIMOR TIMUR	1.	Pr. Pemberantasan Penyakit Menular
	2.	BP. Peningkatan Yankesmas Kab Dili

DISPERPUSIP JATIM

**DAFTAR PROYEK /BAGIAN PROYEK YANG MENGIRIM
LAPORAN TRIWULAN II TETAPI TIDAK MELAMPIRKAN FORM A**

WILAYAH/PROPINSI	PROYEK/BAGIAN PROYEK
PUSAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pr. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat 2. Pr. Generasi Muda Dalam Pembangunan Kesehatan 3. Pr. Peranan Wanita Dalam Pembangunan Kesehatan 4. BP. Penyuluhan AIDS 5. BP. Peran Serta Masyarakat 6. BP. Pengembangan Program PSM (CHN III) 7. BP. Pengujian Se. Farem Alat Kesehatan 8. BP. Pengembangan Obat Tadisional 9. BP. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Binkes
DKI JAKARTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pr. Pelayanan Kesehatan Rujukan & RS 2. BP. Peningkatan Yankesmas Kodya Jakarta Barat 3. BP. Peninkatan Pendidikan PAM Keperawatan (Program Anestesi) 4. BP. Pengembangan RS Jantung Harapan Kita 5. BP. BPFK 6. BP. Pendidikan & Latihan Pegawai Bapelkes Cilandak
JAWA BARAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pr. Pemberantasan Penyakit Menular 2. Pr. Perbaikan Gizi 3. Pr. Penyediaan & Pengawasan Air Bersih 4. Pr. Peningkatan Yankesmas Prop. Jabar 5. BP. Peningkatan Yankesmas Kab Pandeglang 6. BP. Peningkatan Yankesmas Kab Lebak 7. BP. Peningkatan Yankesmas Kab Tasikmalaya 8. BP. Peningkatan Yankesmas Kab Kuningan 9. BP. Peningkatan Yankesmas Kab Majalengka 10. BP. Peningkatan Yankesmas Kab Cianjur 11. BP. Peningkatan Yankesmas Kab Subang 12. BP. Peningkatan Yankesmas Kab Tangerang 13. BP. Peningkatan Yankesmas Kab Serang

WILAYAH/PROPINSI	PROYEK/BAGIAN PROYEK	
	14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.	BP. Peningkatan Yankesmas Kab Cirebon BP. Peningkatan Yankesmas Kab Purwakarta BP. Peningkatan Yankesmas Kab Sukabumi BP. Peningkatan Yankesmas Kodya Bogor BP. Peningkatan Yankesmas Kodya Tangerang BP. Peningkatan Yankesmas Kodya Cirebon BP. Peran Serta Masyarakat BP. Peningkatan Yankes RS Jiwa Bandung BP. Peningkatan Yankes RS Jiwa Cimahi BP. Peningkatan Yankes Gigi Jabar BP. Peningkatan Pendidikan Bidan SPK Tangerang BP. Peningkatan Pendidikan Bidan SPK Bogor BP. Peningkatan Pendidikan Bidan SPK Karawang BP. Perencanaan Umum Kesehatan
JAWA TENGAH	1. 2. 3.	Pr. Pengendalian & Pengawasan Obat Makanan Pr. Peningkatan Kesehatan Lingkungan & Pemukiman BP. Peningkatan Yankes Jiwa Klaten
DI YOGYAKARTA	1. 2. 3.	Pr. Pendidikan & Pelatihan Tenaga Kesehatan BP. Peningkatan Bidan SPK Depkes Yogya BP. Peningkatan Yankesmas Kab Kulonprogo
JAWA TIMUR	1.	BP. Peningkatan Yankesmas Kab Tuban
DI ACEH	1. 2. 3.	BP. Rujukan & RS BP. Yankes Jiwa Aceh BP. Peningkatan Bidan SPK Meulaboh

WILAYAH/PROPINSI	PROYEK/BAGIAN PROYEK	
SUMATERA UTARA	1.	Pr. Pengendalian & Pengawasan Obat Makanan
	2.	BP. Peningkatan Yankesmas Kodya Tanjung Balai
SUMATERA BARAT	1.	BP. Peningkatan Yankesmas Kab Pariaman
	2.	BP. Peningkatan Yankesmas Kab Limapuluh Kota
JAMBI	1.	Pr. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat
	2.	Pr. Perbaikan Gizi
	3.	Pr. Penyediaan & Pengawasan Air Bersih
	4.	Pr. Pendidikan Tenaga Kesehatan
	5.	Pr. Pendidikan & Pelatihan Pegawai
	6.	BP. Peningkatan Yankesmas Kodya Jambi
	7.	BP. Peningkatan RSUD Jambi
	8.	BP. Perencanaan Umum Kesehatan
SUMATERA SELATAN	1.	BP. Peningkatan Yankesmas Kab OKI
	2.	BP. Peningkatan Yankesmas Kab Muaraenim
	3.	BP. Peningkatan Yankesmas Kab Lahat
LAMPUNG	1.	Pr. Perbaikan Gizi
KALIMANTAN SELATAN	1.	Pr. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat
	2.	BP. Peningkatan Yankesmas Kab Dati II Kota Baru
	3.	BP. Peningkatan Yankesmas Kab Hulu Sungai Selatan
	4.	BP. Peningkatan Yankesmas Kab/Kodya Banjarmasin
	5.	BP. Peningkatan RSUD Ulin Banjarmasin
	6.	BP. Peningkatan Pendidikan AKZI Banjarmasin
	7.	BP. Peningkatan Pendidikan Bidan SPK Banjarmasin
	8.	BP. Peningkatan Pendidikan Bidan SPK Martapura
	9.	BP. Prasarana Fisik Fasilitas Kerja
	10.	BP. Perencanaan Umum Kesehatan

WILAYAH/PROPINSI	PROYEK/BAGIAN PROYEK
KALIMANTAN TIMUR	1. BP. Perencanaan Umum Kesehatan
SULAWESI UTARA	1. BP. Peningkatan Yankesmas Kab B. Mongondow
MALUKU	1. BP. Peningkatan Yankesmas Kodya/Kab Ambon 2. BP. Perencanaan Umum Kesehatan
NUSA ENGGARA TIMUR	1. BP. Peningkatan Yankesmas Kab Kupang
IRIAN JAYA	1. BP. Manajemen Proyek Kes. Masyarakat & Gizi 2. BP. Peningkatan Pendidikan Bidan SPK Merauke 3. BP. Perencanaan Umum Kesehatan
TIMOR TIMUR	1. Pr. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat 2. Pr. Peningkatan Kesehatan Lingkungan & Pemukiman 3. Pr. Pemberantasan Penyakit Menular 4. BP. Peran Serta Masyarakat 5. BP. Peningkatan Yankesmas Kab Ainaro 6. BP. Peningkatan Yankesmas Kab Viqueque

**DAFTAR PROYEK /BAGIAN PROYEK YANG MENGIRIM LAPORAN
TRIWULAN II DISATUKAN BLN**

WILAYAH/PROPINSI	PROYEK/BAGIAN PROYEK	
JAWA BARAT	1.	Pr. Pemberantasan Penyakit Menular
JAWA TENGAH	1. 2. 3.	BP. Peningkatan Yankesmas Kab Cilacap BP. Peningkatan Yankesmas Kab Purbalingga BP. Peningkatan Yankesmas Kab Banjarnegara
KALIMANTAN BARAT	1. 2.	Pr. Pelayanan Rujukan & RS Pr. Pendidikan Tenaga Kesehatan

**INVENTARISASI KESALAHAN PENGISIAN LAPORAN PELAKSANAAN
KEMAJUAN PROYEK PADA TRIWULAN II TA. 1996/1997**

NO.	PROPINSI PROYEK/BAGIAN PROYEK	JENIS KESALAHAN
	PUSAT	
	Pr. Prasarana Fisik Fasilitas Kerja	Prosentase fisik
	BP. Pengembangan Sistim Informasi Kesehatan	Prosentase fisik
	DKI JAKARTA	
	Pr. Pengembangan RS Fatmawati	
	Pr. Pengembangan RS Kanker Dharmais	
	Pr. Perbaikan Gizi	Prosentase fisik
	BP. RS Jantung Harapan Kita	
	BP. Peningkatan Kesehatan Jiwa	
	BP. Peningkatan Sarana Obat & Makanan	
	BP. Pendidikan AKPER	Prosentase fisik
	BP. Pendidikan & Pelatihan Pegawai Cilandak	
	JAWA BARAT	
	BP. Peningkatan Yankesmas Kab. Subang	Jumlah Realisasi
	BP. Peningkatan Yankesmas Kodya Cirebon	Jumlah Realisasi
	BP. Pengembangan RSTP Cisarua	Jumlah Realisasi
	BP. Pengembangan RS Mata Cicendo	Prosentase Fisik
	BP. Peningkatan Yankes Jiwa Bogor	Prosentase Fisik
	BP. Peningkatan Pendidikan Bidan SPK Tasikmalaya	Prosentase Fisik
	BP. Peningkatan Pendidikan Bidan SPK Rangkasbitung	Prosentase Fisik
	D.I. YOGYAKARTA	
	Pr. Peningkatan Kesehatan Lingkungan & Pemukiman	Realisasi Fisik
	BP. Balai Tehnik Kesehatan Lingkungan	Prosentase Fisik

NO.	PROPINSI PROYEK/BAGIAN PROYEK	JENIS KESALAHAN
	<p>SUMATERA BARAT</p> <p>Pr. Peningkatan Laboratorium Kesehatan Pr. Pemberantasan Penyakit Menular BP. Peningkatan Peranan Wanita</p> <p>JAMBI</p> <p>Pr. Peningkatan RSUD Jambi Pr. Perbaikan Gizi Pr. Penyediaan & Pengelolaan Air Bersih BP. Peningkatan Yankesmas Kodya Jambi BP. Peningkatan Pendidikan APK Jambi BP. Peningkatan Pendidikan Bidan SPK Jambi BP. Perencanaan Umum Kesehatan</p> <p>SUMATERA SELATAN</p> <p>Pr. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Pr. Peningkatan Laboratorium Kesehatan BP. Peningkatan Yankesmas Kab. Ogan Komering Ilir BP. Peningkatan Yankesmas Kab. Musirawas BP. Peningkatan Yankesmas Kodya Palembang BP. Pengembangan RSUD Sungai Kundur BP. Peningkatan Pendidikan Bidan SPK Palembang BP. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan</p> <p>LAMPUNG</p> <p>Pr. Pendidikan & Pelatihan Tenaga Kesehatan Pr. Pelayanan Rujukan & RS BP. Peningkatan Peran Serta Masyarakat BP. Peningkatan Yankesmas Kab Batam ADB III BP. Peningkatan Yankes Jiwa Lampung BP. Pendidikan Bidan SPK Kota Bumi</p>	<p>Jumlah Realisasi, % Fisik Prosentase Fisik Jumlah Realisasi</p> <p>Prosentase Fisik Prosentase Fisik Prosentase Fisik Prosentase Fisik Prosentase Fisik Prosentase Fisik Prosentase Fisik</p> <p>Prosentase Fisik Prosentase Fisik Prosentase Fisik Prosentase Fisik Prosentase Fisik, % Fisik Prosentase Fisik Prosentase Fisik Prosentase Fisik</p> <p>Prosentase Fisik Jumlah Realisasi Prosentase Fisik Jumlah Realisasi Jumlah Realisasi Jumlah Realisasi</p>

NO.	PROPINSI PROYEK/BAGIAN PROYEK	JENIS KESALAHAN
	BENGKULU	
	Pr. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Realisasi
	Pr. Pemberantasan Penyakit Menular	Prosentase Fisik
	Pr. Perbaikan Gizi	Prosentase Fisik
	BP. Peningkatan Yankesmas Kab. Bengkulu Selatan	Prosentase Fisik
	BP. Peningkatan Puskesmas OECF	Prosentase Fisik
	BP. Peningkatan RS Dati I Bengkulu	Prosentase Fisik
	BP. Peningkatan Yankes Jiwa Bengkulu	Prosentase Fisik
	BP. Peningkatan Sarana Obat & Makanan	Prosentase Fisik
	BP. Peningkatan Pendidikan Bidan SPK Manna	Prosentase Fisik
	BP. Peningkatan Peranan Wanita	Prosentase Fisik
	BP. Perencanaan Umum Kesehatan	Prosentase Fisik
	KALIMANTAN BARAT	
	Pr. Perbaikan Gizi	Prosentase Fisik
	BP. Peningkatan RSUD Dr. Sudarno Pontianak	Jumlah Realisasi
	KALIMANTAN TENGAH	
	BP. Peningkatan RSUD Dr. Doris Silvanus	Jumlah Realisasi
	KALIMANTAN TIMUR	
	Pr. Peningkatan Kesehatan Lingkungan & Pemukiman	Jumlah Realisasi
	SULAWESI UTARA	
	BP. Peningkatan RSUD Dr. Aloet Saboe Gorontalo	Jumlah Realisasi
	SULAWESI TENGAH	
	BP. Pendidikan & Pelatihan Pegawai Sulawesi Tengah	Jumlah Realisasi
	SULAWESI SELATAN	
	Pr. Pengembangan RSUP Ujung Pandang	Prosentase Fisik
	Pr. Perbaikan Gizi	Prosentase Fisik
	BP. Peningkatan Yankesmas Kodya Pare-pare	Jumlah Realisasi
	BP. Perencanaan Umum Kesehatan	Prosentase Fisik

NO.	PROPINSI PROYEK/BAGIAN PROYEK	JENIS KESALAHAN
	SULAWESI TENGGARA	
	BP. Peningkatan Peran Serta Masyarakat BP. Peningkatan Yankesmas Kodya Kendari BP. Peningkatan RSUD Kendari BP. Peningkatan Yankes Jiwa Kendari	Jumlah Realisasi Jumlah Realisasi Jumlah Realisasi Prosentase Fisik
	MALUKU	
	Pr. Peningkatan Laboratorium Kesehatan BP. Peningkatan Peran Serta Masyarakat BP. Peningkatan Yankesmas Kab. Bacan BP. Peningkatan Sarana Obat & Makanan	Prosentase fisik Prosentase fisik Prosentase fisik Prosentase fisik
	NUSA TENGGARA BARAT	
	Pr. Perbaikan Gizi BP. Peningkatan Yankesmas Kab. Subang	Prosentase Fisik Prosentase Fisik
	NUSA TENGGARA TIMUR	
	Pr. Pelayanan Rujukan & RS BP. Peningkatan Yankesmas Kab Batam ADB III BP. Peningkatan Pendidikan Bidan SPK Waingapu	Prosentase Fisik Prosentase Fisik Prosentase Fisik
	IRIAN JAYA	
	Pr. Pendidikan & Pelatihan Tenaga Kesehatan BP. Pendidikan Akademi Kesehatan Terpadu BP. Peningkatan Yankes Jiwa Jayapura BP. Pengembangan Sistim Informasi Kesehatan	Prosentase Fisik Prosentase Fisik Prosentase Fisik Prosentase Fisik
	TIMOR TIMUR	
	Pr. Pengendalian & Pengawasan Obat dan Makanan BP. Pengembangan RSUD Dili	Prosentase Fisik Prosentase Fisik

KETAATAN PELAPORAN DAN JENIS KESALAHAN
PELAKSANAAN KEMAJUAN PROYEK PEMBANGUNAN DEPKES
TRIWULAN II TA. 1996/1997

PROVINSI	JUMLAH SELURUH PR/FP	PR/FP YANG MELAPOR	PR/FP YANG TIDAK MELAPOR	DATA DIBERIKAN MELAMPIKAN FORM DIA	DATA DIBERIKAN MELAMPIKAN FORM A	JENIS KESALAHAN				
						JUMLAH % PISIK	DINATUNGAN RHAUSARI	DINATUNGAN MUR	DINATUNGAN MUR	DINATUNGAN MUR
1	2=(3+4+5)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DKI JAKARTA	40	28	9	3	-	6	1	-	-	1
JAWA BARAT	71	55	12	4	1	27	4	4	1	-
JAWA TENGAH	72	46	18	8	-	2	-	-	3	-
DI YOGYAKARTA	26	23	1	2	-	3	3	4	-	-
JAWA TIMUR	81	74	-	7	3	1	5	3	-	-
DI ACEH	38	25	6	7	-	3	9	-	-	-
DI SUMUT	43	43	-	-	-	2	12	1	-	-
DI SUMBAR	37	33	-	4	1	2	2	-	-	-
DI LIAU	31	27	-	4	-	-	3	2	-	-
DI RIAU	28	17	4	7	-	8	8	-	-	-
DI SULSEL	35	31	-	4	1	3	9	1	-	-
DI LAMPUNG	30	30	-	-	1	1	4	3	-	-
DI BALBAR	32	18	2	12	1	1	1	1	2	-
DI SULTENG	25	21	3	1	-	-	-	1	-	-
DI SULSEL	34	30	1	3	-	10	-	-	-	-
DI SULTIM	28	17	6	5	-	1	-	1	-	-
DI SULUT	32	10	-	22	-	1	-	1	-	-
DI SULTENG	25	17	4	4	-	-	-	1	-	-
DI SULSEL	47	45	-	2	2	-	4	-	-	-
DI SULTRA	25	17	7	1	-	-	1	3	-	-
DI MALUKU	29	21	7	-	-	2	4	-	-	-
DI BALI	30	27	1	2	1	-	-	1	-	-
DI NTB	27	13	10	4	-	-	2	-	-	-
DI NTT	34	17	11	6	-	1	3	-	-	-
DI RIANG JAYA	42	15	18	9	1	3	4	-	-	-
DI BENGKULU	27	27	-	-	-	-	7	1	-	-
DI TIMTIM	31	13	14	4	2	6	2	-	-	-
JUMLAH DAERAH	999	740	134	125	14	83	88	28	6	1
NASIONAL	74	48	14	12	1	9	2	-	-	-
JUMLAH SELURUH	1073	788	148	137	15	92	90	28	6	1

**DAFTAR OBYEK/SUB OBYEK BANTUAN LUAR NEGERI DEPKES. T.A. 1996/1997
YANG DIOLAH DALAM TRIMULAN II
S/D 15 NOPEMBER 1996**

NO.	PROVINSI	JUMLAH			DATA			DATA		
		OBYEK/SUB OBYEK			YANG MASUK			TIDAK MASUK		
		PR/BP	SOB	JML	PR/BP	SOB	JML	PR/BP	SOB	JML
1	DKI JAKARTA	3	0	3	1	0	1	2	0	2
2	JAWA BARAT	22	3	25	14	0	14	8	3	11
3	JAWA TENGAH	30	4	34	19	3	22	11	1	12
4	D.I. YOGYAKARTA	4	0	4	1	0	1	3	0	3
5	JAWA TIMUR	11	2	13	8	0	8	3	2	5
6	D.I. ACEH	10	1	11	7	0	7	3	1	4
7	SUMATERA UTARA	3	1	4	2	0	2	1	1	2
8	SUMATERA BARAT	9	1	10	8	0	8	1	1	2
9	RIAU	8	1	9	7	1	8	1	0	1
10	JAMBI	4	1	5	1	0	1	3	1	4
11	SUMATERA SELATAN	10	2	12	8	2	10	2	0	2
12	LAMPUNG	9	0	10	7	0	7	2	1	3
13	KALIMANTAN BARAT	13	2	12	11	1	12	0	0	0
14	KALIMANTAN TENGAH	1	0	3	1	0	1	2	0	2
15	KALIMANTAN SELATAN	2	0	4	0	0	0	4	0	4
16	KALIMANTAN TIMUR	9	1	11	5	1	6	4	1	5
17	SULAWESI UTARA	4	1	4	0	0	0	4	0	4
18	SULAWESI TENGAH	5	0	4	1	0	1	3	0	3
19	SULAWESI SELATAN	3	0	4	0	0	0	4	0	4
20	SULAWESI TENGGARA	8	0	4	4	0	4	0	0	0
21	MALUKU	11	2	24	11	2	13	8	3	11
22	BALI	9	3	3	1	0	1	2	0	2
23	NUSA TENGGARA BARAT	5	2	12	3	2	5	6	1	7
24	NUSA TENGGARA TIMUR	22	2	32	16	1	17	8	7	15
25	IRIAN JAYA	18	10	31	10	3	13	16	2	18
26	BENGKULU	19	3	5	3	1	4	1	0	1
27	TIMOR TIMUR	3	0	4	2	0	2	2	0	2
	JUMLAH DAERAH	255	42	297	151	17	168	104	25	129
	P U S A T	35	18	53	22	10	32	13	8	21
	JUMLAH SELURUH	290	60	350	173	27	200	117	33	150

Keterangan : PR/BP = Proyek/Bagian Proyek
SOB = Sub Obyek

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BLN DEPKES T.A. 1996/1997

TRIWULAN II S/D 15 NOPEMBER 1996

MENURUT PROGRAM

DALAM JUTAAN RUPIAH

NO	PROGRAM	OBJEK / SUB OBJEK			JUMAH	JUMAH	REALISASI		CARRY OVER			CARRY OVER		
		JUNE LAH	YG ME LAPOR	BELUM LAPOR	ANGGARAN	ANGGARAN	CURRENT		TAHUN 1996/1996			TAHUN 1994/1995		
					TAHUN 1996/1997	PRYEP YANG MELAPOR	JUMLAH	%	ALOKASI	REALISASI	%	ALOKASI	REALISASI	%
I. KEL. PROGRAM POKOK														
1	PENYULUHAN KES MASYARAKAT	16	14	2	11,040.5	10,805.2	2,030.6	18.8	1,821.5	542.9	29.8	184.4	179.5	97.3
2	PELAYANAN KES MASYARAKAT	147	87	60	89,502.9	40,308.9	764.1	1.9	11,365.4	4,689.3	41.3	1,568.1	0.0	0.0
3	YANKES RILJUKAN & RS	10	7	3	34,085.1	21,392.0	48.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	P 2 M	41	12	29	68,370.9	49,100.6	249.9	0.5	8,174.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	PERBAIKAN GIZI	6	5	1	2,215.4	1,512.2	18.3	1.2	2,217.9	657.7	29.7	1,153.6	13.9	1.2
6	P O M	28	16	12	23,330.8	20,853.0	391.4	1.9	873.4	7.6	1.1	837.1	0.0	0.0
7	BIN.PENGOBATAN TRADISIONAL	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
JUMLAH PROGRAM POKOK		248	141	107	238,545.6	143,971.9	3,503.2	2.4	24,252.2	5,897.5	24.3	3,743.2	193.4	5.2
II. KEL. PROGRAM PENUNJANG														
8	PPAB	1	0	1	4,142.0	0.0	0.0	0.0	3,174.2	3,072.7	0.0	0.0	0.0	0.0
9	PKLP	31	10	21	20,077.8	2,264.0	0.0	0.0	13,168.3	10,115.2	76.8	0.0	0.0	0.0
10	PENDIDIKAN KEDINASAN	33	20	13	19,066.8	12,995.7	977.0	7.5	16.4	0.0	0.0	754.0	242.4	32.1
11	DIKLAT APARATUR NEGARA	18	14	2	4,121.8	3,982.8	166.9	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	LITBANG KESEHATAN	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	PEMBINAAN PEMUDA	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	PERANAN WANITA	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	PENGEMB. INFORMASI KESEHATAN	11	8	3	7,054.7	1,279.4	133.2	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	PENGEMB. HUKUM KESEHATAN	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	PENINGK. PRASARANA & SARANA	1	1	0	371.9	371.9	9.6	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	PENINGKAT. EFISIENSI	9	6	3	9,216.3	3,713.8	131.7	3.5	922.2	109.5	11.9	0.0	0.0	0.0
19	PENDAYAGUNAAN SISLAKWAS	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
JUMLAH PROGRAM PENUNJANG		102	59	43	64,051.3	24,607.6	1,418.4	5.8	17,281.1	13,297.4	78.9	754.0	242.4	32.1
JUMLAH SELURUH		350	200	150	302,596.9	168,579.5	4,921.6	2.9	41,533.3	19,194.9	46.2	4,497.2	435.8	9.7

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BLN DEPKES T.A. 1996/1997

TRIWULAN II S/D 15 NOPEMBER 1996

MENURUT PROVINSI

DALAM JUTAAN RUPIAH

NO	PROVINSI	ORBYEK / SUB ORBYEK			JUMAH	JUMAH	REALISASI		CARRY OVER			CARRY OVER			
		JUM LAH	YG LAPOR	ME BELUM LAPOR	ANGGARAN	ANGGABAN	CURRENT		TAHUN 1995/1996			TAHUN 1994/1995			
					TAHUN 1996/1997	PRYBP YANG MELAPOR	JUMLAH	%	ALOKASI	REALISASI	%	ALOKASI	REALISASI	%	
1	DKI JAKARTA	3	1	2	1,185.1	244.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	JAWA BARAT	25	14	11	8,785.5	2,543.5	263.2	10.3	705.7	564.6	80.0	0.0	0.0	0.0	
3	JAWA TENGAH	34	22	12	24,464.8	11,611.4	654.2	5.6	2,589.7	1,504.8	58.1	0.0	0.0	0.0	
4	D.I. YOGYAKARTA	4	1	3	1,330.5	387.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
5	JAWA TIMUR	13	8	5	18,241.0	12,542.5	52.8	0.4	1,530.5	327.1	21.4	0.0	0.0	0.0	
6	D.I. ACEH	11	7	4	7,055.7	4,204.0	40.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
7	SUMATERA UTARA	4	2	2	4,012.0	1,077.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
8	SUMATERA BARAT	10	8	2	3,381.6	1,802.7	47.1	2.6	319.3	69.4	21.7	0.0	0.0	0.0	
9	R I A U	9	8	1	4,591.2	4,404.4	46.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
10	J A M B I	5	1	4	1,806.7	946.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
11	SUMATERA SELATAN	12	10	2	7,040.0	6,512.2	34.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
12	L A M P U N G	10	7	3	5,355.4	4,929.3	41.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
13	KALIMANTAN BARAT	12	12	0	5,690.0	5,397.0	67.5	1.3	1,210.7	427.6	35.3	0.0	0.0	0.0	
14	KALIMANTAN TENGAH	3	1	2	1,194.3	263.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
15	KALIMANTAN SELATAN	4	0	4	1,387.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
16	KALIMANTAN TIMUR	11	6	5	5,215.1	4,116.1	65.1	1.6	154.3	49.3	32.0	0.0	0.0	0.0	
17	SULAWESI UTARA	4	0	4	751.2	0.0	0.0	0.0	803.3	476.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
18	SULAWESI TENGAH	4	1	3	747.8	226.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
19	SULAWESI SELATAN	4	0	4	1,346.7	0.0	0.0	0.0	1,949.5	1,762.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
20	SULAWESI TENGGARA	4	4	0	830.2	830.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21	W A L U K U	24	13	11	9,820.1	4,880.1	450.4	9.2	0.0	0.0	0.0	754.0	242.4	32.1	
22	B A L I	3	1	2	671.4	231.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
23	MUSA TENGGARA BARAT	12	5	7	3,501.3	1,882.4	35.7	1.8	1,620.9	568.7	35.1	0.0	0.0	0.0	
24	MUSA TENGGARA TIMUR	32	17	15	7,422.5	2,471.9	398.7	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
25	IRIAN JAYA	31	13	18	15,337.2	7,167.5	359.6	5.0	1,656.0	91.5	5.5	0.0	0.0	0.0	
26	B E N G K U L U	5	4	1	1,414.7	909.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
27	TIMOR TIMUR	4	2	2	1,129.3	650.4	0.0	0.0	284.6	56.8	20.0	0.0	0.0	0.0	
	JUMLAH DAERAH	297	168	129	145,208.6	80,332.0	2,555.8	3.2	12,824.5	5,898.7	46.0	754.0	242.4	32.1	
	P U S A T	53	32	21	157,388.3	88,247.5	2,365.8	2.7	28,708.8	13,296.2	46.3	3,743.2	193.4	5.2	
	JUMLAH SELURUH	350	200	150	302,596.9	168,579.5	4,921.6	2.9	41,533.3	19,194.9	46.2	4,497.2	435.8	8.7	

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BLN DEPKES T.A. 1996/1997
 TRIWULAN II S/D 15 NOPEMBER 1996
 MENURUT LOKASI

DALAM JUTAAN RUPIAH

NO	LOKASI	OBJEK / SUB OBJEK			JUMLAH ANGGARAN TAHUN 1996/1997	JUMLAH ANGGARAN PR/PP YANG MELAPOR	REALISASI CURRENT BUDGET		CARRY OVER TAHUN 1995/1996			CARRY OVER TAHUN 1994/1995		
		JUM LAH	YG ME LAPOR	BELUM LAPOR			JUMLAH	%	ALOKASI	REALISASI	%	ALOKASI	REALISASI	%
1	JAWA	79	46	33	54,996.8	27,329.0	970.0	3.5	4,825.9	2,396.5	49.7	0.0	0.0	0.0
2	LUAR JAWA	218	122	96	80,211.8	53,003.0	1,585.8	3.0	7,998.6	3,502.2	43.8	754.0	242.4	32.1
JUMLAH DAERAH		297	168	129	145,208.6	80,332.0	2,555.8	3.2	12,824.5	5,898.7	46.0	754.0	242.4	32.1
P U S A T		53	32	21	157,388.3	88,247.5	2,365.8	2.7	28,708.8	13,296.2	46.3	3,743.2	183.4	5.2
JUMLAH SELURUH		350	200	150	302,596.9	168,579.5	4,921.6	2.9	41,533.3	19,194.9	46.2	4,497.2	435.8	9.7

Lampiran 16

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BLN DEPKES T.A. 1996/1997
 TRIWULAN II S/D 15 NOPEMBER 1996
 MENURUT UNIT ORGANISASI

DALAM JUTAAN RUPIAH

NO	UNIT ORGANISASI	OBJEK / SUB OBJEK			JUMLAH ANGGARAN TAHUN 1996/1997	JUMLAH ANGGARAN PR/PP YANG MELAPOR	REALISASI CURRENT BUDGET		CARRY OVER TAHUN 1995/1996			CARRY OVER TAHUN 1994/1995		
		JUM LAH	YG ME LAPOR	BELUM LAPOR			JUMLAH	%	ALOKASI	REALISASI	%	ALOKASI	REALISASI	%
1	SEKRETARIAT JENDERAL	70	49	21	39,831.5	22,343.8	1,410.4	8.3	938.8	109.5	11.7	754.0	242.4	32.1
2	INSPEKTORAT JENDERAL	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	DITJEN BINKESMAS	169	106	63	112,758.7	52,628.3	2,812.9	5.3	15,404.8	5,890.0	38.2	2,908.1	193.4	6.7
4	DITJEN YANMEDIK	10	7	3	34,085.1	21,392.0	49.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	DITJEN PPM & PLP	28	16	12	23,330.8	20,853.0	391.4	1.9	673.4	7.5	1.1	837.1	0.0	0.0
6	DITJEN P O M	73	22	51	92,590.8	51,364.6	249.9	0.5	24,518.5	13,187.9	53.8	0.0	0.0	0.0
7	BALITBANGKES	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
JUMLAH SELURUH		350	200	150	302,596.9	168,579.5	4,921.6	2.9	41,533.3	19,194.9	46.2	4,497.2	435.8	9.7

JENIS HAMBATAN PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN TAHUN 1996/1997

TRIWULAN II

(BERDASARKAN LAPORAN YANG MASUK ITJEN DEPKEB SAMPAI DENGAN TANGGAL 15 NOPEMBER 1996)

KODE	RINCIAN MASALAH	PROGRAM																		UNIT ORGANISASI								
		I. POKOK							II. PENUNJANG											JUMLAH	01	02	03	04	05	06	07	JUMLAH
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	11.8	11.9	11.10	11.11	11.12	11.13	11.14	11.15	11.16	11.17	11.18									
10101	DIP & PO belum diterima	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
10102	DIP dan PO lambat diterima	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	2	2	-	-	4	
10103	DIP lambat diterima	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	1	-	-	3	
10104	PO lambat diterima	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	2	1	-	-	4	
10106	SK Pimpro belum diterima	1	1	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	2	-	2	2	-	-	8	
10108	SK Bandhwaran Proyek lambat diterima	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	1	2	-	4	
10108	Usul revisi yang diajukan kepada Kakanwil Utan Anggaran, Kakanwil Deperlemen/Kakanwil Dijen yang bersangkutan dan Ketua Bappada Tingkat I belum diterima peratujannya	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	
10110	Usul revisi yang diajukan kepada Kakanwil Dijen/Anggaran, belum diterima peratujannya	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	2	
10111	Usul revisi yang diajukan kepada Menteri/Ketua Lembaga, belum diterima peratujannya	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	3	
10112	Usul revisi yang diajukan kepada Menteri dan Ketua Bappenas belum diterima peratujannya	-	1	1	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4	-	1	1	-	1	7	
10113	Persetujuan revisi lambat diterima	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	1	3	
10115	Perubahan PO lambat diterima	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	2	
10204	PO lambat diterima	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	
10301	DIPP dan PO belum diterima	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	
20103	SK Penggantian Pimpro lambat diterima	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	
20104	Pengganti Bandhwaran Proyek	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	2	
20105	DK Pengganti Bandhwaran Proyek lambat diterima	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	
20109	Pelunjuk Pelaksanaan/Pelunjuk teknis dari Pusat belum diterima	1	2	1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	9	3	-	4	-	-	-	9	
20108	Pelunjuk Pelaksanaan/Pelunjuk teknis dari Pusat lambat diterima	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	-	6	-	-	-	7	
30102	Penetapan Konsultan oleh Pusat lambat diterima	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	
30201	Penyusunan dokumen tender belum selesai dan Konsultan	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	2	
30202	Rembukan dokumen tender lambat	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	
30208	Tender ulang karena harga penawaran melampaui pagu anggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	
30301	Harga tanah melampaui pagu anggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	
40101	Kontrak belum ditanda tangani	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	
40103	Keabsahan dalam perencanaan, sehingga b. diperlukan adanya perubahan lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	
40301	Barang/bahan yang diperlukan tidak tersalurkan di tempat	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1
40303	Barang/bahan yang diperlukan oleh Pusat lambat diterima	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1
40304	Barang/bahan yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1
40401	Tenaga Kerja tidak menanggapi	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	2
40402	Tenaga kerja kurang terampil	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1
40804	Penerbitan SKO lambat	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
40808	Dana bantuan luar negeri belum tersedia, masih dalam proses	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
40612	Rakitan belum menagih	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	2
40613	Rakitan tidak mengambil uang muka	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
40709	Halangan kegiatan dundungan	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	8	3	-	2	-	2	1	-	8

KODE	HINTAN MASALAH	PROGRAM																		UNIT ORGANISASI										
		I. POKOK							II. PENUNJANG											JUMLAH	01	02	03	04	05	06	07	JUMLAH		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	II.9	II.9	II.10	II.11	II.12	II.13	II.14	II.15	II.16	II.17	II.18										II.19	II.20
10118	Lain-lain (DIP & PO)	2	24	8	-	3	7	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	4	-	20	8	-	7	-	45
20110	Lain-lain (Pelayanan & Jukdis)	-	3	-	1	1	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	4	-	5	1	-	-	-	10
30106	Lain-lain (Peningkatan Konsultasi)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	1	-	2
40210	Lain-lain (Parastatistik)	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	3
30214	Lain-lain Tender	-	-	1	2	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	1	2	3	1	7
40305	Lain-lain (Barang/bahan)	-	5	1	-	-	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2	-	5	1	1	2	-	11
40408	Lain-lain (Pembinaan/Trainer/karier)	-	2	3	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	7	-	2	2	-	-	-	11
40509	Lain-lain (Prasana)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	2
40814	Lain-lain (Keuangan)	1	25	7	2	1	1	-	4	2	7	-	-	-	2	2	-	-	-	1	-	55	10	-	30	8	8	1	-	55
40711	Lain-lain (Kontrol)	2	4	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	-	6	-	1	-	-	8
J U M L A H		15	88	87	18	7	20	1	8	8	88	7	3	0	4	3	0	0	8	0	245	50	0	118	82	22	18	8	246	

Sumber Data : Penyusunan Program (P2) / UEN

KETERANGAN :

KELOMPOK PROGRAM POKOK

- 1.1. PENYULUHAN KESEHATAN MASYARAKAT
- 1.2. PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
- 1.3. PELAYANAN KESEHATAN RUKUN & RS.
- 1.4. P 2 M
- 1.5. PERBAIKAN GDI
- 1.6. PENGAWASAN OBAT & MAKANAN
- 1.7. PEMBINA PENGobatan TRADISIONAL

UNIT ORGANISASI :

01. SETJEN
02. IT.FN
03. DITJEN BINIKESMAS
04. DITJEN YANMEDIK
05. DITJEN PPN & PLP
06. DITJEN POM
07. BADAN LITBANGKEB

KELOMPOK PROGRAM PENUNJANG

- II.9. P P A B
- II.9. P K L P
- II.10. PENDIDIKAN KEDINASAN
- II.11. PENDIDIKAN & LATIHAN APARATUR NEGARA
- II.12. PENGAJIAN & PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN TERAPAN
- II.13. PEMBINAAN PEMUDA
- II.14. PERANAN WANITA
- II.15. PENGEMBANGAN INFORMASI KESEHATAN
- II.16. PENGEMBANGAN HUKUM KESEHATAN
- II.17. PENINGKATAN PRASARANA & SARANA APARATUR NEG.
- II.18. PENINGKATAN EFISIENSI APARATUR NEGARA
- II.19. PENDAYAGUNAAN SISTEM & PELAKSANAAN PENGAWASAN